

TABLOID Sinar Tani

TERBIT SETIAP HARI RABU
Harga Tabloid Cetak : Rp 16.000
E-paper : Rp 72.000/Tahun (48 edisi)

www.tabloidsinartani.com

Hotline/SMS : 081317575066
e-mail : redaksi@sinartani.co.id

www.sinartani.co.id

Edisi 5 - 11 Februari 2025

No. 4073
Tahun LV



8 Belum Setengah Bulan, Kebijakan Serap Gabah Direvisi

10 Di Tangan Listi, Singkong jadi Pemanis Ramah Diabetes

14 Wawancara dengan Menteri Perdagangan, Budi Santoso: UMKM pun Bisa Ekspor

TANGIS PETANI SINGKONG

www.sinartani.co.id

[tabloidsinartani.com](https://www.facebook.com/tabloidsinartani.com)

[@SinarTaniST](https://twitter.com/SinarTaniST)

[tabloidsinartani](https://www.instagram.com/tabloidsinartani)

[SINTA TV](https://www.youtube.com/SINTATV)

KAMI MENJANGKAU LEBIH LUAS

Sinar Tani Tabloid Sinartani.com SINTA TV

E-PAPER
Tabloid Sinartani

www.tabloidsinartani.com



BERLANGGANAN E-PAPER
Tabloid Sinartani

Hanya dengan

Rp72.000/Tahun

Akses E-paper tabloid Sinartani selama 1 tahun

Informasi lebih lanjut HUBUNGI : 08131 757 5066



EDITORIAL

Singkong dan Gabah

Singkong dan gabah (padi) menjadi dua komoditas pertanian yang dalam dua minggu terakhir ini menjadi sorotan media. Pada terbitan awal Februari 2025 ini, Tabloid Sinar Tani secara khusus akan mengupas polemik petani singkong di Lampung dan perubahan kebijakan penyerapan gabah petani.

Polemik singkong mencuat setelah terjadi aksi unjuk rasa petani yang berlangsung di depan Gedung Kantor Gubernur dan DPRD Lampung. Namun aksi petani tersebut berlanjut ke Gedung Kementerian Pertanian. Bagi petani singkong, khususnya di Lampung, kedatangan ke Jakarta karena merasa kalangan industri tapioka yang membeli hasil panen telah berbuat tidak adil.

Singkong petani hanya dihargai Rp1.100/kg, bahkan terkena potongan atau rafaksi hingga 35 persen. Sementara industri tapioka menganggap kadar aci singkong petani rendah, sehingga mereka akhirnya menetapkan harga rendah dan menutupi kebutuhan dengan jalan impor.

Dalam pertemuan dengan ratusan petani singkong dan industri tapioka di Kantor Pusat Kementerian Pertanian, Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, akhirnya menetapkan harga pembelian singkong sebesar Rp1.350/kg. Bukan hanya itu, industri diwajibkan membeli singkong petani dan melarang impor tapioka selama pasokan dalam negeri masih ada.

Selain polemik petani singkong, Tabloid Sinar Tani juga menyoroti kebijakan pemerintah melalui Badan Pangan Nasional yang memperbaharui kebijakan Harga Pembelian Gabah (HPP) yang belum mencapai setengah bulan. Pada 12 Januari 2025, Kepala Badan Pangan Nasional menerbitkan Keputusan No. 2 Tahun 2025 yang berlaku pada 15 Januari 2025. Namun 24 Januari 2025, terbit keputusan terbaru No. 14 Tahun 2025.

Dalam keputusan terbaru tersebut, pembelian gabah oleh Perum Bulog hanya mengacu satu harga yakni Gabah Kering Panen (GKP) sebesar Rp 6.500/kg, tanpa embel-embel kualitas kadar air dan kadar hampa. Sedangkan ketentuan pembelian Gabah Kering Giling (GKG), rafaksi dan harga beras ditiadakan. Dengan ketentuan baru tersebut, pemerintah berharap Perum Bulog bisa mencapai target serapan 3 juta ton setara beras.

Berita lain yang disajikan minggu ini adalah kedatangan Antonius J. Supit ke kantor Tabloid Sinar Tani. Bagaimana sebagai seorang pengusaha, Anton Supit, sapaan akrab Komisaris Utama PT Sreeya Indonesia ini melihat masa depan pertanian Indonesia. Baginya, ketika negara lain telah selesai dalam mengurus pertanian dan beralih ke industri dan teknologi informasi, bangsa Indonesia masih belum selesai menangani pertanian. Pola peningkatan produksi pangan juga masih fokus pola lama yakni ekstensifikasi.

Minggu ini, Tabloid Sinar Tani juga menyajikan hasil wawancara dengan Menteri Perdagangan, Budi Santoso. Untuk membantu pelaku usaha UMKM, termasuk bidang pertanian, Kementerian Perdagangan ternyata mempunyai Program UMKM BISA Ekspor. Saat ini telah terbentuk dua pusat ekspor baru di luar Pulau Jawa, terdapatnya 100 UMKM ekspor hasil program UMKM BISA Ekspor, dan tercapainya 600 UMKM yang mendapatkan pelatihan ekspor. Selengkapnya bisa dibaca di Tabloid Sinar Tani yang terbit awal Februari ini.

SAUNG TANI



Harga anjlok, ratusan petani singkong Lampung datang ke Kementan
- mirisnya nasib petani

Acuan harga GKG dan rafaksi gabah dicabut
- Bulog yang pusing

Kemendag buka kesempatan UMKM bisa ekspor
- Yang kecil juga punya kesempatan



Desain Cover: Budi Putra K.
Foto Cover: Istimewa

Pemimpin Umum/Penanggung Jawab : Dr. Ir. Memed Gunawan; **Pemimpin Perusahaan :** Ir. Mulyono Machmur, MS; **Pemimpin Redaksi :** Yulianto; **Redaktur Pelaksana :** Yulianto; **Redaktur :** Gesha Yuliani, S.Pi; **Staff Redaksi :** Julian Ahmad; Nattasya; Indri Hapsari, S. Sos; Echa; Herman Rafi; **Koresponden :** Wasis (Cilacap), Soleman (Jatim), Suriady (Sulsel), Abdul Azis (Aceh), Suroyo (Banten), Gultom (Sumut), Nsd (Papua Barat); **Layoutman :** Suhendra, Budi Putra Kharisma; **Korektor/Setter :** Asrori, Hamdani; **Sekretariat Redaksi :** Hamdani; **Pengembangan Bisnis :** Dewi Ratnawati; Indri; Echa Sinaga; **Keuangan :** Katijo, SE (Manajer); Ahmad Asrori; **Sekretariat Perusahaan :** Suparjan; Jamhari; Awan; **Distribusi :** Saptyan Edi Kurniawan, S.AP; Dani; Jamhari

Penerbit : PT. Duta Karya Swasta; **Komisaris :** DR. Ir. A. H. Rahadian, M.Si; Ir. Achmad Saubari Prasodjo

Direktur Utama : DR. Ir. Memed Gunawan; **Direktur :** Ir. Mulyono Machmur, MS

Alamat Redaksi dan Pemasaran/Iklan : Jl. Harsono RM No. 3 Ragunan Jakarta 12550, Telp. (021) 7812162-63, 7817544 Fax: (021) 7818205

Email : redaksi@sinartani.co.id; **Izin Terbit :** No. 208/SK/Menper/SIUPP/B.2/1986; Anggota SPS No. 58/1970/11B/2002; **Izin Cetak :** Laksus Pangkopkamtibda Jaya No. Kep. 023/PK/IC/7; **Harga :** Rp. 16.000 per edisi; **Tarif Iklan :** FC Rp. 8000/mmk, BW Rp. 7.000/mmk; **Pembayaran :** Bank Mandiri Cab. Ragunan No. 127.0096.016.413, BNI 46 Cab. Dukuh Bawah Jakarta No. 14471522, Bank Agro Kantor Pusat No. 01.00457.503.1.9 a/n Surat Kabar Sinar Tani. Bank BRI Cabang Pasar Minggu: a/n PT. Duta Karya Swasta No. 0339.01.000419.30.1; **ISSN :** 0852-8586; **Percetakan :** PT. Aliansi Temprina Nyata Grafika



PINDAI BARCODE!
Untuk Mengakses e-paper Sinartani.



Andi Amran Sulaiman
Menteri Pertanian RI

Setelah Atasi Krisis, Saatnya Kita Melompat

Salam bahagia untuk pahlawan pertanian. Kita sudah ketahui bersama Tahun 2024 sektor pertanian mencatatkan capaian gemilang. Dengan keputusan yang cepat dan tepat, Indonesia berhasil mengatasi ancaman krisis pangan. Fenomena El nino, La nina dan kekeringan tahun lalu berhasil dilewati.

Krisis ekonomi sudah kita lewati, krisis kesehatan sudah kita lewati, krisis pangan sudah kita lewati. Sekarang saatnya kita melompat, jadi kita naikan produksi secara eksponensial, bukan biasa-biasa saja. Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS), produksi padi Januari hingga Maret 2025 diperkirakan mengalami kenaikan rata-rata 50% dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya.

Bahkan, sebagai dampak dari melimpahnya produksi, harga beras di Januari yang biasanya tinggi akibat paceklik, tahun ini turun. Januari tahun lalu harga tertinggi sepanjang Indonesia merdeka, sekarang baik, bahkan harga di bawah HPP (Harga Pembelian Pemerintah-red). Pada Februari tahun lalu, harga beras di tingkat konsumen mencapai Rp 15.000/kg. Bahkan karena terjadi kelangkaan, sempat terjadi antrean sehingga di beberapa toko pembelian beras sempat dibatasi maksimal 15 kg per orang.

Kondisi ini diperparah dengan adanya 22 negara yang menghentikan ekspor pangannya ke Indonesia. Bisa dibayangkan kalau krisis pangan terjadi, itu akan terjadi krisis politik, konflik sosial, negara dalam keadaan bahaya.

Salah satu keputusan cepat saat terjadi ancaman kekeringan akibat El Nino adalah menjalankan program pompanisasi secara massif. Kegiatan memompa air dari sungai dan sumber air lainnya dilakukan untuk mengairi 500 ribu ha lahan pertanian di Pulau Jawa dan 500 ribu ha lainnya di luar pulau Jawa.

Untuk itu, Kementerian Pertanian melakukan pengalihan anggaran sebesar Rp1,7 triliun untuk program pompanisasi, pengadaan alat dan mesin pertanian, pengadaan bibit untuk petani. Hasilnya terjadi peningkatan produksi yang cukup signifikan. Petani yang sebelumnya hanya bisa menanam padi sekali dalam setahun, meningkat menjadi tiga kali.

BPS mencatat terjadi kenaikan produksi padi sebesar 1,49 juta ton pada periode Agustus-Desember 2024. Hasil refocusing anggaran yang untuk perjalanan dinas, rehab kantor, saya katakan kantor ini tidak akan runtuh sampai 5 tahun, kita tunda saja. Ini menghasilkan Rp 17 triliun. Rp 1,7 triliun menghasilkan Rp 17 triliun.

Di sisi lain, kami menyoroti penurunan harga akibat melimpahnya produksi perlu mendapat solusi agar tidak merugikan petani. Saat ini berdasarkan data yang ada sekitar 70% harga gabah berada di bawah HPP yang telah ditetapkan pemerintah sebesar Rp 6.500 per kg. Penentu sekarang adalah Bulog, Bulog harus menyerap (gabah hasil petani-red), agar petani tidak rugi.

Cetak Sawah, Suatu Keniscayaan?

Di tengah tantangan pangan global, cetak sawah muncul sebagai solusi yang dianggap perlu. Tapi, apakah ini langkah cerdas atau justru masalah baru?



Lahan sawah rawa pasang surut, Kalsel

Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa kita harus swasembada pangan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Selanjutnya kabinet merah putih menargetkan swasembada pangan (sebut beras) asalnya tahun 2029 dipercepat menjadi tahun 2027.

Bahkan mulai 2025 ini kita semua bertekad untuk tidak impor jagung pakan, beras, gula, dan garam konsumsi, demikian Menko Zulhas menyampaikan beberapa waktu lalu.

Arahan presiden tersebut diatas erat kaitannya dengan kondisi perberasan Indonesia saat ini, dimana impor beras naik signifikan sejak tahun 2022 hingga 2024.

Kondisi memprihatinkan ini tidak boleh berlangsung terlalu lama dan harus dihentikan. Caranya tidak lain adalah kita harus genjot produksi pangan nasional, terutama beras sebagai makanan pokok kita.

Menurut catatan, Presiden telah mengeluarkan lebih dari 10 kebijakan untuk mencapai target swasembada pangan. Termasuk beberapa hari lalu Presiden telah menandatangani 4

aturan baru, yaitu: (1) Inpres sistem irigasi nasional, (2) Perpres tentang neraca komoditas, (3) Perpres menyangkut pupuk, dan (4) Inpres tentang penyuluhan.

Resep Soeharto

Badan Pusat Statistik (BPS) biasanya menghitung produksi padi (ton) = produktivitas (t/ha) x luas panen (ha). Estimasi produktivitas menggunakan metode survei ubinan, sedangkan estimasi luas panen dengan metode kerangka sampling area (KSA).

Berdasarkan formula tersebut maka peningkatan produksi bisa dilakukan melalui peningkatan produktivitas dan luas panen. Selanjutnya faktor produktivitas dan luas panen ditentukan oleh seabreg peubah yang satu sama lain saling terkait.

Produktivitas ditentukan oleh peubah sarana dan prasarana dan inovasi teknologi, peraturan perundangan, dan sumberdaya manusia pertanian.

Sejak jaman revolusi hijau atau pasca perang dunia II, inovasi teknologi yang berhasil mengunkit

produktivitas adalah varietas, pemupukan, pengendalian hama dan penyakit, dan belakangan adalah pemanfaatan alsintan dan *smart farming* termasuk di dalamnya *Internet of Thing*.

Saat Presiden Soeharto berhasil mencapai swasembada pangan tahun 1984, telah terjadi peningkatan produktivitas dan produksi padi nasional yang sangat signifikan.

Dari tahun 1970 (awal program Bimas/Inmas) ke tahun 1985 (swasembada), peningkatan produktivitas mencapai sekitar 160% dan peningkatan produksi lebih dari 200%.

Namun demikian sejak tahun 1995 hingga kini, produktivitas dan produksi padi nasional sedikit fluktuatif, tetapi secara umum relatif stagnan.

Ketimpangan Lahan

Lantas kenapa Thailand dan Vietnam lahannya sedikit tapi bisa ekspor beras, sedangkan Indonesia kok impor beras terus-terusan? Sungguh pertanyaan yang sangat menggelitik dan nampaknya publik menunggu jawaban *clear* dari pihak yang berwenang.

Luas sawah baku Thailand dan Vietnam memang jauh di bawah Indonesia, yaitu berturut-turut 6,42 juta dan 4,59 juta ha, sedangkan Indonesia 7,46 juta ha. Demikian pula produktivitas padi Thailand hanya 3,09 t/ha GKG masih di bawah Indonesia 5,19 t/ha GKG, sedangkan Vietnam diatas kita 5,82 t/ha GKG.

Indonesia dengan jumlah penduduk 274 juta jiwa, konsumsi 119 kg/org/th memerlukan beras sekitar 32,5 juta t/th sedangkan produksi hanya sekitar 31,5 juta t/th, sehingga defisit beras sekitar 1 juta t/th, belum termasuk cadangan beras pemerintah (CBP) sekitar 2,5 juta t/th.

Sedangkan Thailand jumlah penduduknya hanya sekitar 70 juta orang, konsumsi beras 90 kg/org/th memerlukan beras hanya sekitar 6,3

juta t/th sedangkan produksi 20,1 juta t/th, sehingga surplus beras sekitar 13,8 juta t/th.

Demikian pula Vietnam jumlah penduduknya hanya 97 juta jiwa, konsumsi beras hanya 83 kg/org/th memerlukan beras sekitar 8,1 juta t/th sedangkan produksi sekitar 27,2 juta t/th, sehingga surplus beras sekitar 19,1 juta t/th.

Rasio lahan sawah terhadap jumlah penduduk Indonesia hanya 0,027 ha/org, Thailand sangat tinggi 0,092 ha/org (lebih 3 kali lipat Indonesia), sedangkan Vietnam juga tinggi 0,047 ha/org (hampir 2 kali lipat Indonesia).

Tampak bahwa rasio lahan sawah terhadap jumlah penduduk di Indonesia yang sangat rendah merupakan peubah yang berkontribusi signifikan terhadap neraca beras nasional yang sering membuat "gaduh" kita.

Selain itu peubah konsumsi beras (119 kg/org/th) kita ternyata termasuk tertinggi di Asia, bandingkan dengan negara Jepang yang hanya 60 kg/org/th.

Jelaslah bahwa luas sawah baku dan pola konsumsi masyarakat perlu mendapat perhatian yang serius dari pemerintah bila kita ingin swasembada pangan secara berkelanjutan.

Cetak Sawah

Selain berbagai terobosan, seperti: tambah alokasi pupuk subsidi 2 kali lipat menjadi 9,55 jt t/th, pompanisasi, optimasi lahan rawa, brigade pangan, pertanian moderen, Kementan juga bertekad untuk mencetak sawah baru 3 juta ha hingga 2029.

Cetak sawah baru yang relatif luas, terutama dilaksanakan di Kalimantan Selatan dan Papua Selatan.

Kebijakan ini dirasakan sangat tepat dengan pertimbangan agar rasio lahan sawah terhadap jumlah penduduk meningkat secara signifikan.

Memang benar, cetak sawah baru adalah suatu keniscayaan bila kita ingin swasembada beras berkelanjutan.

Penulis: Dedi Nursyamsi

Penyuluh Pertanian Ahli Utama, Kementan



Permintaan Karet masih Melar

Dari berbagai komoditas perkebunan, karet alam tidak beda dengan kopi dan kakao mempunyai hari depan yang menggiurkan. Data menunjukkan, kontrak jangka karet di pasar Tokyo telah naik sekitar 40% selama setahun terakhir. Hal itu menjadikan karet sebagai salah satu komoditas pertanian berkinerja terbaik, selain kopi dan kakao.

Apa penyebabnya? Perubahan iklim merupakan faktor utama yang mendorong perubahan ini baik dari sisi permintaan maupun penawaran. Transisi energi ke energi terbarukan berarti dunia akan membutuhkan lebih banyak karet di masa depan dibandingkan dengan sekitar 15 juta metrik ton yang diproduksi saat ini.

Dari segi permintaan peralihan ke moda transportasi yang lebih ramah lingkungan akan meningkatkan permintaan karet alam karena mobil listrik yang mempunyai beban lebih berat dibandingkan kendaraan konvensional. Hal ini disebabkan muatan baterainya dikombinasikan dengan kemampuannya untuk

berakselerasi lebih cepat, menyebabkan keausan pada ban akan lebih cepat.

Mobil listrik mengkonsumsi ban sekitar 20% lebih cepat dibandingkan dengan kendaraan konvensional. Dengan mobil listrik yang sudah menguasai 50% pasar mobil di Tiongkok. Hal ini berarti semakin banyak mobil yang perlu mengganti bannya lebih sering dibanding di masa lalu.

Sedangkan dari segi suplai produksi karet terus menurun karena perubahan iklim dan konversi ke tanaman lain yang dianggap lebih menguntungkan seperti sawit dan tebu. Diperkirakan 80% tanaman karet dunia berasal sepertiga dari Thailand, seperlima dari Indonesia dan sepersepuluh dari Vietnam.

Di Thailand perubahan iklim telah menyebabkan perkebunan-perkebunan karet lama yang lokasinya berada di Selatan khatulistiwa mulai hilang dan beralih ke wilayah-wilayah baru yang berada jauh di utara. Penyebabnya, karena wilayah dengan pertumbuhan optimal semakin jauh dari khatulistiwa, sehingga

menimbulkan deforestasi yang akan mempersulit ekspor ke Uni Eropa sebagai akibat dari adanya aturan yang semakin ketat tentang deforestasi.

Banjir di Thailand Selatan semakin memperparah penurunan produksi sebesar 320.000 ton setara dengan sekitar 2% konsumsi karet tahunan global. Selain itu luas lahan karet terus menyusut seperti di India misalnya berkurang sebesar 102.000 hektar sejak tahun 2010 setara dengan 20% total luas perkebunan karet.

Produksi karet di Thailand mencapai puncaknya pada tahun 2004 dan sejak itu turun sekitar 27%. Hal yang sama terjadi di Indonesia sejak produksi mencapai puncak pada tahun 2017. Konversi ke sawit juga merupakan ancaman seperti di Indonesia dan Malaysia. Misalnya, sekitar 10.500 hektar lahan karet per tahun beralih menjadi lahan sawit sejak tahun 2010.

Karet adalah satu satunya polimer yang sepenuhnya alami dan karbon netral sehingga layak untuk terus dipertahankan. **Sumber: Bloomberg**

Tangis Petani Singkong



Konferensi pers Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman bersama petani singkong

Habis sudah kesabaran petani singkong. Selalu tertekan harga yang rendah, ribuan petani singkong dari tujuh kabupaten berunjuk rasa di depan kompleks Kantor Gubernur dan DPRD Lampung, Senin (13/1). Tak puas, perwakilan petani singkong dari Lampung akhirnya mendatangi Gedung Kementerian Pertanian, Jumat (31/1) meminta pemerintah menyelesaikan masalah petani.

Petani singkong dalam negeri saat ini tengah menangis. Komoditas pangan lokal yang selama ini bisa menjadi penyokong komoditas pangan utama yakni padi, ternyata menghadapi problem besar. Saat saudaranya petani padi tengah mendapat kado tahun baru dengan naiknya harga pembelian pemerintah (HPP) dari Rp 6.000 menjadi Rp 6.500/kg. Bahkan Perum Bulog diwajibkan menyerap gabah petani sebanyak 3 juta ton setara beras.

Di sisi lain, petani singkong justru bernasib sebaliknya. Harga singkong di tingkat petani hanya sekitar Rp 1.000-1.100/kg. Mirisnya, kalangan industri tapioka yang menyerap singkong petani mengenakan potong (rafaksi) hingga 35 persen. Artinya, jika dihitung harga singkong petani hanya sekitar Rp 700/kg.

Karena itu, wajar petani yang berasal dari Kabupaten Lampung Tengah, Lampung Timur, Lampung Utara, dan Tulang Bawang. Ada juga petani yang berangkat dari Tulang Bawang Barat, Mesuji, dan Way Kanan menuntut perbaikan nasib. Mereka berharap kenaikan harga singkong, paling tidak menjadi Rp 1.400/kg dengan rafaksi 15 persen. Kalkulasi tersebut, sudah cukup menguntungkan bagi petani singkong, khususnya yang berada di Lampung.

Provinsi tersebut selama ini memang terkenal dengan sentra singkong dalam negeri. Pada 2024 diproyeksikan produksi mencapai 7,5 juta ton dari lahan seluas 254 ribu ha. Jumlah produksi tersebut naik dibandingkan pada 2023 sebanyak 7,1 juta ton, dengan luas

lahan 243 ribu ha. Sedangkan pada tahun 2022, produksinya sebesar 6,7 juta ton.

Sebagian besar singkong yang dihasilkan petani di Lampung saat ini untuk memenuhi kebutuhan industri tapioka. Sedangkan yang untuk konsumsi sekitar 10 persen dari total produksi dalam setahun. Sentra produksi singkong di Lampung ada di Kabupaten Lampung Utara, Lampung Timur, Tulang Bawang Barat dan Tulang Bawang. Sentra terbesar dengan produksi melebihi 1 juta ton ada di Kabupaten Lampung Tengah.

Kesepakatan Harga

Dalam pertemuan ratusan petani singkong di kantornya, Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, akhirnya menetapkan harga pembelian singkong untuk industri tepung nasional sebesar Rp1.350/kg dan akan mengusulkan larangan impor tapioka selama pasokan dalam negeri ada. "Keputusan ini sebagai bentuk perlindungan bagi petani singkong," katanya.

Dalam pertemuan dengan petani singkong dari Lampung, hadir juga kalangan industri tapioka, salah satunya PT. Bumi Waras. Pertemuan tersebut sebagai tindak lanjut dari unjuk rasa petani singkong di Lampung. Kedatangan petani ke Gedung Kementerian Pertanian sebagai bentuk kekecewaan karena perusahaan menyerap singkong petani dengan harga rendah.

Ada yang membeli singkong di harga Rp1.100 per kg dengan rafaksi 15-18 persen. Tapi ada juga pabrik tapioka lainnya menetapkan harga Rp1.300-Rp1.400 per kg, tetapi rafaksinya di angka 35-38 persen. "Harga sudah ditetapkan

dan tidak boleh diganggu gugat. Saya putuskan dan tetapkan harga singkong petani Rp1.350/kg. Kalau ada yang melanggar, berhadapan dengan saya," tegas Amran jumpa pers usai menerima audiensi petani singkong dan industri tepung tapioka.

Keputusan lainnya menurut Amran, kebijakan impor singkong akan diperketat. Semua impor singkong harus mendapatkan persetujuan dan rekomendasi dari Kementerian Pertanian (Kementan). Impor juga tidak diperbolehkan sebelum seluruh hasil panen petani singkong dalam negeri terserap sepenuhnya.

Amran juga akan mengusulkan singkong masuk ke dalam komoditas Lartas (Larangan dan Pembatasan). Dengan masuknya singkong ke dalam daftar Lartas, pengawasan terhadap perdagangan singkong akan lebih ketat untuk melindungi petani dalam negeri.

"Kami telah berkoordinasi dan akan mengirim surat ke Menteri Perdagangan (Budi Santoso.red) untuk menahan kebijakan impor per hari ini. Impor tidak boleh masuk selama singkong dalam negeri terserap semua," tuturnya.

Sanksi Tegas

Menurut Amran, keputusan ini diambil sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto kepadanya untuk melindungi kepentingan petani. Karena itu, keputusan ini harus dijalankan semua pihak, baik petani maupun industri. Jika ada industri yang melanggar kesepakatan ini, maka akan dikenakan sanksi tegas.

"Kalau ada industri yang melanggar harga ini, kami akan beri sanksi. Jangan main-main!

Saya bapaknya petani dan industri singkong. Jangan ada yang melanggar komitmen. Industri harus untung, petani juga harus tersenyum," ujar Amran yang juga meminta pejabat di Ditjen Tanaman Pangan untuk turun melihat langsung kondisi petani singkong di Lampung. Bukan hanya itu, Amran juga meminta Satgas Pangan juga ikut memantau perkembangan harga singkong yang dibeli industri.

Menanggapi keputusan Kementerian Pertanian, Ketua Perkumpulan Petani Ubi Kayu Indonesia (PPUKI) Lampung, Dasrul Aswin mengatakan, pihaknya siap patuh dan akan mengikuti keputusan tersebut. Namun ia juga berharap pelaku industri tepung juga mematuhi. "Jangan sampai keputusan sudah dibuat, tetapi pelaku industri tidak mematuhi. Ini jelas merugikan petani karena harga yang selama ini ada sangat kecil," katanya.

Sementara itu, Direktur PT Bumi Waras, Widarto yang menjadi salah satu industri yang menyerap singkong petani juga menerima keputusan tersebut. Tapi ia meminta bahwa kadar aci tetap menjadi dasar harga di lapangan. Saat ini perusahaan tersebut mempunyai kapasitas 500 ribu ton/tahun dengan kebutuhan bahan baku 100 ton/hari.

Ketua Umum Masyarakat Singkong Indonesia (MSI), Arifin Lambaga memberi apresiasi atas pertemuan petani, industri dan para pihak terkait membahas harga singkong dan larangan terbatas (lartas) impor tapioka. Kebijakan tersebut diharapkan bisa diterima dan menjadi solusi atas kisruh singkong selama ini.

Namun, ia menekankan, penetapan harga tersebut harus diikuti dengan komitmen bersama dari semua pihak. Dukungan harus diberikan kepada petani untuk meningkatkan hasil produksi dan pihak industri tapioka juga perlu mendapatkan singkong berkualitas dengan kadar pati tinggi. **Yul**

Suara Petani Singkong: Naikkan Harga dan Stop Impor



Teks: Maradoni (Ketua PPUKI Lampung Tengah) dan Dasrul Aswin (Ketua Umum PPUKI Lampung)

Petani singkong di Lampung menuntut pemerintah untuk menghentikan impor singkong. Mereka berharap pasokan hasil panen petani lokal dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh industri dalam negeri sebelum mempertimbangkan opsi impor.

Ratusan petani singkong dari Lampung, Jumat (31/1) mendatangi gedung Kementerian Pertanian. Mereka menuntut keadilan. Pasalnya,

harga singkong petani yang dibeli industri tapioka hanya Rp 1.000-1.100/kg. Bahkan harga tersebut belum dipotong rafaksi hingga 35 persen.

Kedatangan petani singkong ke Jakarta, setelah sebelumnya petani menggelar unjuk rasa di Gedung Gubernur dan DPRD Lampung. Bagi mereka, pemerintah daerah belum mampu menyelesaikan persoalan yang petani hadapi.

Dalam dialog dengan Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, petani mengeluhkan kondisi yang mereka alami dan meminta pemerintah membuat keputusan menaikkan harga singkong menjadi Rp 1.400/kg. Selain itu juga menutup kran impor tapioka yang menyebabkan harga singkong di Lampung anjlok.

Usai bertemu dengan Menteri Pertanian, Ketua Perhimpunan Petani Ubi Kayu Indonesia (PPUKI) Lampung

Timur, Maradoni mengatakan, petani memberikan apresiasi kepada pemerintah yang sudah menaikkan harga singkong. "Kami berharap ke depan petani singkong bisa lebih sejahtera dengan kenaikan harga. Bagi kami pengusaha adalah mitra kami," katanya.

Ia mengungkapkan saat ini pendapatan petani singkong jauh dari cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup. Rata-rata penghasilan petani singkong hanya berkisar Rp 350-750 ribu/ha/bulan dengan produksi sekitar 25-27 ton/ha. Dengan pendapatan tersebut tentu tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Apalagi di tengah tingginya biaya hidup, juga biaya pendidikan dan kesehatan.

"Petani singkong di Lampung biasa menjual hasil panen dalam bentuk singkong langsung anter ke industri tapioka. Karena itu, kami juga meminta, industri membeli singkong petani lebih dahulu sebelum membeli dari luar (negeri, red)," katanya.

Dengan rata-rata produksi 25-27 ton/ha, Maradoni mengaku,

petani masih menghadapi kendala produktivitas karena tidak adanya bibit unggul dari pemerintah maupun perusahaan. "Kami berharap ada bantuan bibit unggul agar produktivitas bisa meningkat dan hasil panen lebih menguntungkan," tambahnya.

Sementara itu Ketua Umum PPUKI Provinsi Lampung, Dasrul Aswin, menjelaskan bahwa produktivitas rata-rata tanaman singkong milik petani hanya 20-25 ton/ha. Dengan biaya produksi Rp mencapai Rp 14 juta, sebenarnya petani bisa menghasilkan 30 ton/ha.

"Tetapi petani harus menghadapi potongan yang diberlakukan industri mencapai 30-35%. Misalnya, jika petani menjual singkong ke industri dengan harga Rp1.070/kg, setelah dipotong 30%, petani dapat apa," kata Dasrul.

Kualitas Bisa Diadu

Petani juga menyoroti alasan utama industri lebih memilih impor karena harga murah dan kadar aci yang lebih tinggi. Namun, klaim tersebut menurut Dasrul tidak sepenuhnya benar. Berdasarkan hasil uji laboratorium terhadap singkong milik petani, ternyata kadar aci cukup tinggi.

"Kami sudah melakukan uji laboratorium dari Sucofindo, singkong lokal usia 5 bulan memiliki kandungan pati 30,34%, sementara di usia 10 bulan kandungannya 29,83%. Ini kadar aci tertinggi. Jadi

kualitas singkong Lampung paling baik," katanya.

Dengan kadar aci tersebut, ungkap Dasrul, seharusnya dengan berat 3,5 kg singkong saja sudah bisa menghasilkan 1 kg tepung tapioka. Jika harga singkong Rp1.400/kg, maka harga tepung tapioka sekitar Rp 4.500/kg. Artinya, produk dalam negeri sebenarnya lebih murah dibandingkan impor.

Karena itu, Dasrul menyesalkan industri tepung tapioka yang seharusnya membeli singkong dari dalam negeri, justru lebih mementingkan impor. Hal ini yang justru merusak harga singkong petani. Saat ini, harga singkong yang diterima petani masih jauh dari harapan. "Harga Rp 1.350/kg sebenarnya belum cukup menguntungkan bagi kami, tetapi kami terima. Padahal, dulu harga pernah mencapai Rp 2.000 per kg," ungkapnya.

Padahal menurut Dasrul, petani singkong dalam industri tapioka sudah pernah difasilitasi Pemerintah Daerah Lampung untuk melakukan kesepakatan. Saat itu kalangan industri tapioka sepakat membeli singkong petani seharga Rp 1.400/kg dan menyetop impor. "Tapi yang terjadi apa? Mereka masih membangkang juga," sesalnya.

Dengan siklus budidaya singkong memakan waktu sekitar 9 bulan hingga 1 tahun, Dasrul mengatakan, petani membutuhkan kepastian harga yang lebih stabil dan menguntungkan. Keputusan Kementerian Pertanian menetapkan harga singkong Rp 1.350/kg, petani masih menganggap sudah cukup, meski memang belum sesuai harapan petani.

Saat ini biaya produksi singkong Rp 489/kg dan biaya panen Rp 250/kg. Hitungannya, jika harga singkong petani Rp 1.350/kg, setelah dikurangi dengan kedua biaya komponen tersebut Rp 739/kg, maka pendapatan petani hanya sekitar Rp 500/kg.

"Hitung-hitungan keuntungan petani sangat tipis. Dengan produksi rata-rata 25 ton/ha dan potongan 15% dari hasil kotor membuat pendapatan kami semakin menurun. Itu hasil yang kami dapatkan selama 9 bulan," tambahnya.

Dasrul mengakui, selama ini memang pemerintah tidak menetapkan harga singkong. Karena itu, petani berharap ada peraturan menteri, peraturan daerah dan peraturan bupati yang mengatur penetapan harga singkong. "Kalau aturan itu ada, kami tidak tiap tahun ribut soal harga. Kami menghargai keputusan harga tersebut," tuturnya.

Bagi petani, perusahaan adalah mitra bagi petani. Petani sebagai pihak yang memproduksi, sedangkan industri sebagai pihak yang membeli dan mengolah hasil panen petani. Karena itu, petani berharap agar keputusan harga dan penghentian impor singkong benar-benar dipatuhi perusahaan.

"Kami juga mendesak pemerintah dan pihak terkait untuk menetapkan harga standar yang lebih layak, sehingga petani bisa mendapatkan keuntungan yang lebih adil dan keberlanjutan industri singkong dalam negeri tetap terjaga," harap Dasrul mewakili petani singkong Lampung. **Herman/Yul**

Selamatkan Petani Singkong

Singkong bagi Provinsi Lampung merupakan aset pertanian yang berharga. Dengan adanya kisruh antara petani singkong dengan industri, Masyarakat Singkong Indonesia (MSI) mendesak pemerintah menyelamatkan singkong Lampung.

Provinsi Lampung merupakan sentra produksi singkong utama di Tanah Air. Pada tahun 2022, Lampung menghasilkan 6,7 juta ton umbi singkong segar atau sekitar 40% dari total produksi singkong nasional. Sekitar 90% dari produksi singkong di Lampung diserap industri tapioka yang menghasilkan devisa sekitar Rp 10 triliun, belum termasuk hasil samping seperti ongkok, dan lain sebagainya.

"Jadi, sangat disayangkan jika potensi ini tidak terkelola dengan baik yang akhirnya merugikan semua pihak," kata Ketua Umum MSI, Arifin Lambaga dalam pers rilis yang disampaikan ke media massa, beberapa waktu lalu.

Saat ini menurut Arifin, produksi singkong di Lampung terus menurun dalam 10 tahun terakhir. Tertinggi sebesar 9 juta ton pernah dicapai pada 2010, tapi setelah itu terus menurun hingga 2022 kurang dari 7 juta ton. Bahkan, pada 2019 di bawah 5 juta ton, dengan produktivitas yang relatif rendah yaitu 22 ton/ha.

Aktifitas on-farm yang petani lakukan menyebabkan produktivitas rendah dan rendemen (kandungan pati atau aci) juga rendah. Hal ini menurut Arifin, karena petani melakukan panen terlalu cepat yakni sekitar 6 bulan. Selain itu, banyaknya bahan ikutan lain seperti tanah, batu dan bonggol.

Di lain pihak, ungkap Arifin, industri memerlukan bahan baku singkong yang kompetitif, rendemen tinggi dan bersih atau tidak banyak kotoran. Standar tersebut umumnya tidak mampu dipenuhi petani kecil. "Ini menjadikan hasil panen singkong petani tidak terserap seluruhnya oleh industri atau jika terserap dibeli dengan harga yang relatif murah," ujarnya.

Berdasarkan hasil mediasi Pemerintah Provinsi Lampung pada 23 Desember 2024, disepakati harga singkong sebesar Rp 1.400/kg dengan rafaksi maksimal 15%. Kesepakatan itu menurut Arifin, ternyata memberatkan bagi industri tapioka karena harga pasar global yang terus menurun. "Sejumlah pabrik tapioka besar memilih menghentikan kegiatan produksi, sehingga tidak lagi membeli singkong dari petani. Inilah yang



mendorong demonstrasi besar dari petani," tuturnya.

Di sisi lain ungkap Arifin, telah terjadi ketidaksalingpercayaan (trust) antara pembeli (industri) dan produsen (petani) dalam penetapan rendemen dan besarnya potongan (rafaksi). Penetapan kadar aci (rendemen) singkong dan besarnya rafaksi ditetapkan sepihak oleh pembeli, umumnya rendemen yang diterima petani sekitar 20% dan rafaksi antara 15 sampai 30%.

"Besarnya rafaksi ini ditentukan dari kadar aci dan kotoran singkong termasuk bonggol, tanah dan batu. Karena itu sangat beralasan jika petani menuntut transparansi dalam penetapan rendemen dan besaran rafaksi tersebut," kata Arifin.

Langkah Jangka Pendek

Menyadari besarnya potensi singkong dalam meningkatkan ketahanan pangan, mensejahterakan petani dan menjadi penyumbang devisa negara, Arifin mengatakan, MSI mendesak Pemerintah Pusat dan Daerah melakukan beberapa langkah baik jangka pendek maupun panjang.

Dalam jangka pendek, kata Arifin, perlu kebijakan menyelamatkan singkong hasil panen petani yang tidak terserap pabrik. Hal ini perlu untuk menghindari kerugian lebih besar pada petani yang

menggantungkan hidupnya pada singkong. Selain itu, memberikan dukungan dan akses kepada petani untuk mendapatkan bantuan/subsidi pembiayaan dan sarana produksi seperti bibit dan pupuk.

"Pemerintah agar memfasilitasi petani untuk menerapkan standard operating prosedur budidaya yang benar agar kualitas singkong memenuhi standar yakni pati tinggi, sehingga perlu efisiensi pada pengolahan dan transportasi," katanya.

Arifin juga mengusulkan agar pmda melakukan pendekatan dan fasilitasi agar kedua pihak (petani dan pelaku industri tapioka) dapat terus berkomunikasi mencapai kesepakatan harga yang diterima bersama. "Disinilah perlu keterbukaan atau transparansi semua pihak terkait komponen biaya produksi di tingkat usaha tani dan pabrik tapioka," katanya.

MSI secara khusus mengusulkan harga singkong di tingkat petani minimal Rp 1.200/kg dengan rafaksi maksimal 15%. Usulan ini sudah dikaji tim MSI dengan mempertimbangkan berbagai aspek dan tetap fleksibel untuk direvisi. "Pelu dicari formula baku dalam menghitung harga singkong segar yang masuk ke pabrik. Jadi ada dasar bersama sebagaimana komoditas tanaman pangan lainnya," ujarnya.

Dalam jangka pendek, Arifin juga mendesak agar segera ada koordinasi pemerintah pusat, terutama Kementerian Pertanian, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, dan instansi terkait lainnya. "Pemda agar membantu komunikasi yang intensif antara petani dan kemitraan pabrik-petani," tambahnya.

Arifin menilai, koordinasi sangat penting karena solusi singkong secara komprehensif melibatkan banyak aspek yang terkait. Salah satunya, perlu transparansi kebutuhan tapioka dalam negeri sehingga ada skala prioritas untuk menyerap produksi lokal sebelum diputuskan impor.

Langkah Jangka Panjang

Dalam jangka panjang, MSI mengusulkan, wajib bagi pelaku industri tapioka untuk bermitra dengan petani singkong lokal. Dengan kemitraan ini, pabrik terlibat dalam pembinaan petani meningkatkan produktivitas usaha dan umbi yang dihasilkan sesuai spesifikasi pabrik dengan harga yang sudah disepakati bersama. "Selain itu, transaksi pembelian umbi dapat langsung dilakukan antara petani dan pabrik," kata Arifin.

Usulan lain, dalam jangka panjang Arifin meminta pemerintah menyusun peta jalan (road map) pengembangan industri berbasis singkong di Lampung. Penyusunan peta jalan ini agar melibatkan semua pemangku kepentingan (stakeholder) seperti pemerintah, perbankan, pengusaha, trader, petani, peneliti, akademisi, organisasi/perkumpulan, seperti MSI dan LSM.

Kemudian, kata Arifin, mendorong investasi hilirisasi berbagai produk berbahan baku singkong, disamping memperkuat industri tapioka yang sudah ada. "Kami juga mengusulkan agar singkong menjadi pangan strategis nasional dan tanaman industri, sehingga mempercepat kebijakan dan memudahkan pengembangannya seperti tanaman pangan lainnya. Hal ini penting agar singkong setara dengan padi jagung kedelai dan mendapatkan perhatian khusus dalam berbagai program pemerintah," tuturnya. **Yul**

Petani Singkong Berjuang di Tengah Oligopsoni

Harga singkong terus merosot, membuat petani kian terhimpit. Di tengah dominasi pabrik besar yang mengendalikan harga, mereka berjuang keras agar tak merugi. Bisakah situasi ini berubah?

Polemik tentang harga singkong di Lampung dan sentra produksi lainnya kembali mengemuka, mengundang banyak perhatian dan keluhan dari petani. Harga jual yang terus merosot kontras dengan harga tepung tapioka yang stabil, bahkan terkadang naik.

Kejanggalan ini tentu memunculkan berbagai pertanyaan tentang mekanisme pasar dan struktur industri yang ada. Padahal, singkong adalah salah satu komoditas utama yang seharusnya menjadi penghidupan bagi banyak orang di Lampung.

Menurut Usep Syaipudin, seorang pengamat ekonomi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung (Unila), struktur pasar yang mengelilingi industri singkong di Indonesia bisa dikategorikan sebagai oligopsoni. Sebuah sistem pasar yang hanya dikuasai beberapa pembeli besar.

"Dalam kondisi ini, harga lebih banyak ditentukan pabrik, bukan oleh mekanisme pasar yang seharusnya berjalan secara adil. Petani, yang seharusnya menjadi ujung tombak, malah terjepit dengan harga yang tak pernah berpihak kepada mereka," tuturnya.

Salah satu masalah yang cukup mendalam adalah rendahnya produktivitas singkong di Indonesia, khususnya di Lampung. Dengan hasil panen yang hanya mencapai 25-30 ton/ha, petani Lampung tertinggal jauh dibandingkan negara tetangga seperti Thailand yang bisa memanen hingga 50 ton/ha.

Biaya produksi yang tinggi membuat petani tidak mampu menutupi modal ketika harga singkong turun, yang semakin menambah beban hidup mereka. Jadi, meski pemerintah sudah menetapkan harga dasar singkong sebesar Rp 1.400/kg, kebijakan ini sulit terlaksana jika pabrik tidak membeli dari petani dengan alasan biaya produksi yang meningkat.

"Ini adalah dilema yang nyata bagi petani yang terpaksa menjual dengan harga jauh lebih rendah atau bahkan membiarkan hasil panennya membusuk. Ketidakberpihakan pasar ini menunjukkan ada yang salah dalam rantai distribusi, mengingat harga tepung tapioka yang dihasilkan dari singkong terus mengalami kenaikan," katanya.

Kondisi Ironis

Tantangan yang dihadapi petani singkong, khususnya di Lampung seakan tak pernah berujung. Dengan harga singkong yang terus menurun, bahkan untuk menutupi biaya produksi pun terasa sulit, mereka harus menghadapi kenyataan pahit bahwa harga jual singkong masih jauh dari kata menguntungkan.

Ironisnya, menurut Usep, harga tepung tapioka yang naik tidak sebanding dengan harga singkong. Jika harga bahan bakunya terus ditekan, sementara harga jual produk olahannya terus merangkak naik, maka sudah jelas ada sesuatu yang tidak beres.

"Ini bukan hanya masalah petani, melainkan juga berkaitan

dengan pemerataan ekonomi yang tidak berjalan dengan semestinya. Harga tepung tapioka yang terus merangkak naik menjadi simbol ketimpangan ini, yang semakin terasa oleh para petani," tegasnya.

Peningkatan produktivitas singkong menjadi salah satu solusi yang dapat ditempuh untuk mengatasi masalah ini. Pemerintah harus bekerja sama dengan perguruan tinggi dan lembaga penelitian untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil panen petani.

Usep melihat, hal itu bukan sekadar soal memberikan bibit unggul atau teknik pemupukan yang lebih efektif. Namun soal bagaimana mengubah cara pandang dan strategi dalam bertani agar produktivitas singkong di Indonesia bisa meningkat, setidaknya mendekati angka Thailand. "Bagaimana mungkin harga yang ditawarkan pabrik bisa menguntungkan jika hasil panennya saja tak bisa maksimal?," katanya.

Usep juga mengingatkan, sistem pasar yang mengontrol harga juga perlu mendapat perhatian lebih. Pemerintah, harus lebih aktif mengawasi mekanisme harga, terutama yang berkaitan dengan industri singkong dan tapioka.

Selain itu, pelaku industri tepung tapioka seharusnya lebih memperhatikan nasib petani. Sebab, keberlanjutan industri ini tidak terlepas dari ketersediaan bahan baku yang bersumber dari para petani. "Di sinilah pentingnya terciptanya *win-*

win solution, di mana semua pihak diuntungkan," tegasnya.

Dalam ranah yang lebih luas, menurut Usep, masalah ini berkaitan dengan kesejahteraan sosial yang tidak hanya berfokus pada keuntungan perusahaan atau industri. Karenanya, menjadi tugas pemerintah untuk mendudukkan semua pihak dalam satu meja dan mencari solusi yang adil, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan.

Sementara itu mengenai kebijakan impor tepung tapioka, Usep mengatakan, harus dikaji ulang agar tidak mempengaruhi harga di pasar domestik. Pasalnya, importasi yang tidak terkendali bisa membuat petani lokal terpinggirkan, yang pada akhirnya berimbas pada ketahanan pangan nasional.

Pada sisi lain, Badan Pusat Statistik mencatatkan bahwa volume impor singkong pada tahun lalu meningkat tajam, lebih dari sembilan kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya. Vietnam menjadi negara penyumbang terbesar singkong impor ke Indonesia, mencapai lebih dari 90% dari total impor.

Meskipun impor singkong hanya berkontribusi sedikit terhadap total produksi nasional, tetap saja fenomena ini menjadi gambaran ketidakseimbangan pasar yang perlu disikapi dengan bijak. Sementara itu, volume impor tepung tapioka juga mencatatkan angka tertinggi dalam lima tahun terakhir, menunjukkan tingginya permintaan untuk produk olahan singkong. **Gsh/Yul**



Belum Setengah Bulan, Kebijakan Serap Gabah Direvisi

Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional kembali memperbaharui kebijakan Harga Pembelian Gabah (HPP). Beleid baru tersebut tertuang dalam Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Republik Indonesia No. 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional No. 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Harga Pembelian Pemerintah dan Rafaksi Harga Gabah dan Beras.

Jika melihat terbitnya Keputusan Kepala Bapanas No. 2 Tahun 2025, maka terbilang belum setengah bulan karena terbit pada 12 Januari 2025 dan berlaku pada 15 Januari 2025. Sedangkan Keputusan Kepala Bapanas No. 14 Tahun 2025 terbit pada 24 Januari 2025. Terbitnya Keputusan Kepala Bapanas terbaru tersebut setelah secara Menko bidang Pangan bersama kementerian/badan terkait beberapa kali menggelar rapat koordinator terbatas membahas kebijakan perberasan.

Dari sisi penetapan HPP gabah memang tidak mengalami perubahan dari Keputusan Kepala Bapanas No. 2 Tahun 2025 yakni HPP gabah kering panen (GKP) Rp 6.500/kg. Namun ada perubahan signifikan yakni mengenai persyaratan kualitas gabah dan adanya kebijakan rafaksi untuk GKP.

Dalam Keputusan Kepala Bapanas No. 2 Tahun 2025, pemerintah menetapkan HPP GKP di petani sebesar Rp 6.500/kg dengan kualitas kadar air maksimal 25 persen dan kadar hampa maksimal 10 persen. Sedangkan, GKP di penggilingan sebesar Rp 6.700/kg dengan kualitas kadar air maksimal 25 persen dan kadar hampa maksimal 10 persen.

Untuk harga Gabah Kering Giling (GKG) di penggilingan sebesar Rp 8.000/kg dengan kualitas kadar air maksimal 14 persen dan kadar hampa maksimal 3 persen. Adapun, GKG di gudang Bulog sebesar Rp 8.200/kg dengan kualitas kadar air maksimal 14 persen dan kadar hampa maksimal 3 persen.

Untuk harga beras, pemerintah juga menetapkan harga di gudang Bulog sebesar Rp 12.000/kg dengan kualitas derajat sosoh minimal 100 persen, kadar air maksimal 14 persen, butir patah maksimal 25 persen, dan butir menir maksimal 2 persen.

Setelah itu dalam Keputusan Kepala Bapanas No. 2 Tahun 2025 juga menetapkan kebijakan rafaksi GKP di petani dan penggilingan padi. Rafaksi berdasarkan kualitas yakni kadar air dan kadar hampa. Misalnya, jika GKP petani, kadar airnya 25

persen, tapi kadar hampa 11-15 persen, maka akan terkena rafaksi Rp 300/kg. Dengan demikian harganya menjadi Rp 6.200/kg.

Berdasarkan Keputusan Kepala Bapanas No. 14 tahun 2025, ketentuan mengenai harga pembelian gabah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I huruf A dan Lampiran II Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional No. 2 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Harga Pembelian Pemerintah dan Rafaksi Harga Gabah dan Beras *dicabut dan dinyatakan tidak berlaku*.

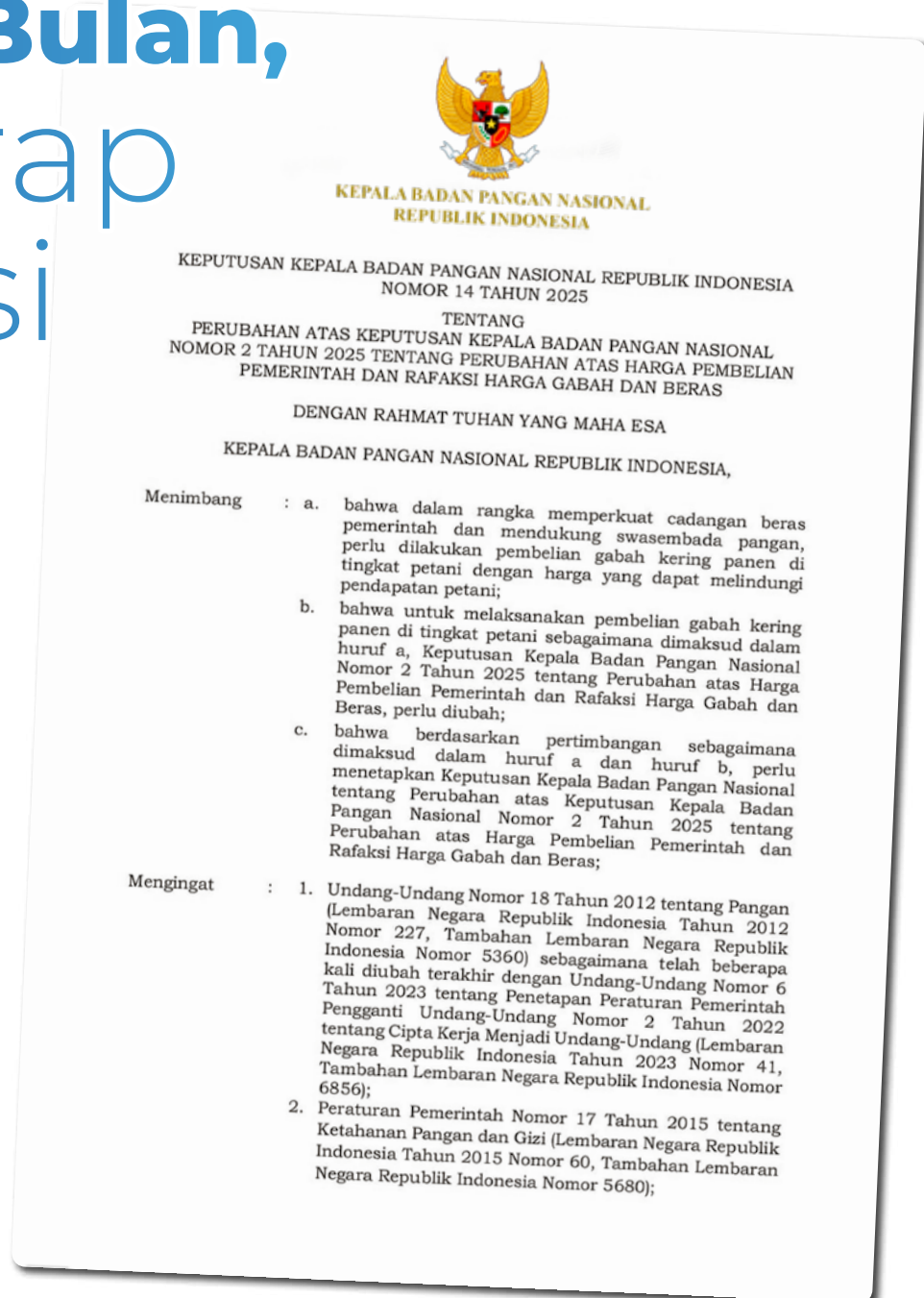
Dalam kebijakan terbaru tersebut juga menekankan Perum Bulog untuk melaksanakan pembelian GKP di tingkat petani. Bahkan BUMN bidang pangan ini diwajibkan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan pembelian GKP di tingkat petani kepada Kepala Bapanas. Laporan tersebut ditembuskan ke Menteri Koordinator Bidang Pangan, Menteri Keuangan, Menteri Pertanian, dan Menteri Badan Usaha Milik Negara. Laporan hasil pelaksanaan pembelian GKP di tingkat petani memuat data petani yang menjual GKP, volume pembelian GKP dan lokasi pembelian GKP.

Satu hal lagi yang tidak tercantum dalam Keputusan Kepala Bapanas, tapi menjadi kesepakatan bersama adalah mengenai derajat sosoh. Pada Keputusan Kepala Bapanas No. 2 Tahun 2025, ditetapkan derajat sosoh 100 persen. Namun sesuai hasil Rakortas Menko bidang Pangan, derajat sosoh kembali diturunkan menjadi 95 persen.

Lindungi Petani

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Arief Prasetyo Adisekaligus Ketua Dewan Pengawas Bulog mengatakan, untuk melindungi petani sebagai elemen penting dalam percepatan swasembada pangan, pihaknya telah menetapkan HPP GKP di tingkat petani sebesar Rp 6.500/kg dan meniadakan rafaksi harga gabah. Kebijakan tersebut diatur melalui Keputusan Kepala Bapanas No 14 Tahun 2025.

"HPP GKP di petani Rp 6.500/kg.



Penyesuaian ini dengan tujuan untuk melindungi sedulur petani kita, sehingga tetap dan terus semangat berproduksi demi swasembada pangan," ujar Arief se usai menghadiri Penandatanganan Komitmen Bersama Serap Gabah Petani dengan Perum Bulog dan TNI AD, di Jakarta, pada Kamis (30/1).

Arief mengatakan, momentum panen raya tahun ini sangat penting untuk mengoptimalkan serapan gabah/beras dalam negeri. Karena itu, sesuai hasil Rakortas Kementerian Koordinator Bidang Pangan, pihaknya telah bersurat kepada Direktur Utama Perum Bulog untuk melaksanakan penugasan pengadaan gabah dan beras dalam negeri pada tahun 2025 dengan target sebanyak 3 juta ton setara beras.

"Dengan target ini dan juga dengan kebijakan HPP gabah yang sudah disesuaikan dengan kepentingan petani, kita berharap serapan gabah petani dalam negeri dapat berjalan secara optimal. Tentunya dengan harapan bahwa proyeksi panen raya dari BPS dapat terealisasi dengan baik di lapangan," urai Arief.

Berdasarkan amatan Badan Pusat Statistik (BPS), proyeksi panen pada Januari dan Februari masing-masing 1,31 juta ton beras dan 2,08 juta ton beras. Lalu pada Maret diperkirakan akan melonjak menjadi 5,20 juta ton beras. Angka ini sudah melampaui konsumsi beras bulanan sebesar 2,5 juta ton atau mengalami surplus.

Berdasarkan tren, diperkirakan produksi beras masih akan surplus seiring musim panen raya di April dan Mei.

Direktur Utama Perum Bulog, Wahyu Suparyono mengatakan, sesuai aturan baru dari Badan Pangan Nasional, tidak ada lagi ketentuan mengenai Harga Gabah Kering Giling (GKG), beras, dan rafaksi. Bulog akan melakukan penyerapan gabah dan beras dalam negeri akan mengacu pada kebijakan Bapanas yang mengatur mekanisme penyerapan gabah.

"Insyaallah, kami siap mengoptimalkan penyerapan gabah dan beras pada musim panen pertama ini," tutur Wahyu. Untuk mengatasi kendala di lapangan, Bulog akan bekerja sama dengan Sucofindo sebagai pihak independen yang memastikan kualitas gabah yang diserap sesuai dengan harga yang ditetapkan.

Untuk mengatasi kendala kapasitas gudang, Wahyu mengatakan, Bulog akan bekerjasama dengan berbagai pihak, termasuk BUMN, Kementerian Perdagangan, dan institusi lainnya. Bulog memiliki kapasitas gudang 3,2 juta ton, saat ini tersedia ruang untuk 1,3 juta ton. "Jika masih kurang, kami bekerja sama dengan ID Food yang menyediakan kapasitas 187.000 ton, sistem resi gudang dari Kementerian Perdagangan sebesar 158.000 ton, serta gudang mitra dan TNI yang masing-masing menampung ratusan ribu ton," kata Wahyu. **Yul**



Komitmen Bersama Amankan Gabah Petani

Ada yang berbeda dengan mekanisme penyerapan gabah oleh Perum Bulog tahun ini. Jika tahun-tahun sebelumnya target penyerapan berlangsung sepanjang tahun, maka di tahun Ular Kayu, pemerintah menargetkan serapan gabah Bulog sebanyak 3 juta ton setara beras bisa tercapai pada April.

Perpadi,” kata Arief. Dengan stok beras di gudang Bulog saat ini berkisar 1,9-2 juta ton, dengan tambahan serapan 3 juta ton setara beras, Arief yakin dalam waktu 3-4 bulan ke depan, total stok di Bulog akan mencapai 5 juta ton.

Derajat Sosoh

Sebagai upaya mempercepat penyerapan, pemerintah juga telah menyetujui penyesuaian derajat sosoh beras dari 100 persen menjadi 95 persen. Penurunan tersebut diharapkan mempermudah proses pengolahan oleh penggilingan padi.

Dalam Keputusan Badan Pangan Nasional No. 2 tahun 2025, ditetapkan standar derajat sosoh 100 persen untuk pembelian beras Perum Bulog. Namun dalam Keputusan Badan Pangan Nasional No. 12 Tahun 2025, standar tersebut tak lagi tercantum. Kebijakan mengembalikan standar derajat sosoh 95 persen berdasarkan hasil kesepakatan Perum Bulog, Perpadi dan Kementerian Pertanian.

Setelah berbagai pertimbangan, diantaranya penggilingan padi akan kesulitan memenuhi standar tersebut. Hal ini diakui Ketua Umum Perpadi, Sutarto Alimoeso bahwa derajat sosoh berkaitan dengan daya simpan beras. beras dengan derajat sosoh 95 persen mempunyai kualitas yang baik dan daya simpan yang masih bagus. Namun di sisi lain standar tersebut akan sulit dipenuhi penggilingan padi.

“Ada keputusan yang menarik kaitannya dengan derajat sosoh. Kalau secara teknis perberasan, makin tinggi derajat sosohnya sebenarnya kandungan vitaminnya makin berkurang. Namun untuk disimpan lama biasanya derajat sosoh memang harus lebih baik,” tuturnya.

Dengan penyesuaian derajat sosoh tersebut, Sutarto optimis pengusaha penggilingan dapat mengejar target penyerapan 3 juta ton. “Jadi 95 persen saya kira sudah sangat baik. Jadi nanti yang

(beras) kecil-kecil pun bisa mampu langsung untuk setor ke Bulog sehingga insya Allah menuju 3 juta ton itu kita bisa lakukan,” ucapnya.

Direktur Utama Perum Bulog, Wahyu Suparyono, menyatakan kesiapan penuh menjalankan tugas besar ini dengan optimal untuk menyerap gabah petani sesuai target yang telah ditetapkan. “Tahun ini Bulog diberi amanah besar untuk mewujudkan kemandirian pangan nasional dengan menyerap gabah,” ujarnya.

Wahyu menegaskan, penyerapan gabah dan beras dalam negeri tersebut akan mengacu pada kebijakan Bapanas dan Permentan yang mengatur mekanisme penyerapan gabah. Untuk meningkatkan penyerapan gabah, Bulog telah bekerja sama dengan BUMN lain, Kementerian Perdagangan, dan Perpadi. “Jika diperlukan tambahan gudang penyimpanan. Saat ini, kapasitas penyimpanan yang tersedia mampu menampung 1,5 juta ton,” katanya.

Untuk membantu Bulog menyerap gabah, pemerintah telah menyediakan anggaran sebesar Rp16 triliun dari APBN. Seperti diungkapkan Menko Pangan, Zulkifli Hasan, pemerintah telah menyiapkan anggaran besar untuk mendukung langkah ini. Keuangan Perum Bulog saat ini sebesar Rp 23 triliun, ditambah lagi dengan tambahan Rp 16,6 triliun dari Kementerian Keuangan, sehingga totalnya mencapai Rp 39 triliun.

Dana ini akan digunakan untuk membeli 3 juta ton beras dalam periode Februari hingga April 2025. “Tidak ada alasan lagi bagi Bulog untuk tidak menyerap gabah petani dengan harga yang sudah ditentukan. Ini pekerjaan besar yang membutuhkan dukungan semua pihak, mulai dari Menteri Dalam Negeri, gubernur, bupati, camat, hingga tingkat desa. TNI dan Polri juga akan membantu memastikan aturan ini berjalan dengan baik,” tegasnya. **Yul**

Berdasarkan catatan Tabloid Sinar Tani, pembahasan mengenai serapan gabah petani telah berlangsung sejak awal tahun. Bahkan pada 12 Januari 2025, Kepala Badan Pangan Nasional menerbitkan Surat Keputusan No. 2 Tahun 2025 mengenai Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah dan beras, serta harga rafaksi gabah.

Namun pasca Rapat Koordinasi Terbatas Menko Pangan, Keputusan tersebut direvisi dengan keluarnya Surat Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional No. 14 Tahun 2025 tanggal 24 Januari. Artinya, tak hampir setengah bulan, terjadi perubahan kebijakan. Dalam keputusan terbaru tersebut, pemerintah tak lagi memberlakukan HPP Gabah Kering Giling (GKG) dan Beras, serta ketentuan rafaksi untuk GKP.

Angka 3 juta ton setara beras bagi Bulog bukan jumlah yang sedikit. Pasalnya, tahun lalu Bulog hanya mampu menyerap sebanyak 1,26 juta ton setara beras. Langkah awal komitmen penyerapan gabah, Kementerian Pertanian pun menggelar penandatanganan komitmen penyerapan gabah antara Bulog Korwil Seluruh Indonesia, Perkumpulan Pedagang Beras dan Perusahaan Penggilingan Padi Indonesia (Perpadi) dan TNI AD di Jakarta, Kamis (30/1).

Dalam komitmen tersebut, Pemerintah memutuskan Perum Bulog wajib menyerap gabah petani

sebanyak 3 juta ton setara beras hingga April 2025. Bahkan Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman meminta Bulog segera menyerap gabah petani sesuai HPP guna menjaga stabilitas pangan dan kesejahteraan petani, terutama saat panen raya. “Alhamdulillah, hari ini kita sepakat menyerap beras hingga April 2025 sebanyak 3 juta ton setara beras,” katanya.

Penyerapan gabah tersebut menurut Amran, karena diperkirakan saat panen raya Februari-April akan ada surplus produksi. Bahkan produksi padi pada periode tersebut lebih tinggi hingga 50 persen dibandingkan periode sama tahun 2024 lalu. Pada Maret, diperkirakan produksi padi mencapai 2,9 juta ton dan April meningkat menjadi 4 juta ton. “Kami berharap 3 juta ton ini bisa terserap sepenuhnya,” tegas Amran.

Sementara itu, Kepala Badan Pangan Nasional, Arief Prasetyo Adi mengatakan, sebagai upaya peningkatan penyerapan beras dan peningkatan kesejahteraan petani, pemerintah mengambil langkah strategis. Selain komitmen Bulog untuk siap menyerap 3 juta ton gabah setara beras pada periode puncak panen, pemerintah juga menyesuaikan derajat sosoh dari 100 persen menjadi 95 persen.

“Kita semua sepakat mengamankan 3 juta ton gabah setara beras. Kemudian kami sampaikan, atas permintaan Menteri Pertanian Amran dan

Di Tangan Listi, Singkong jadi Pemanis Ramah Diabetes

Ketika petani singkong di Lampung sangat tergantung pasarnya dengan industri tapioka, Listi Sukmawati justru mengubah singkong menjadi Glucosweet, pemanis yang ramah bagi penderita diabetes. Hadirnya produk tersebut menjadikan alternatif dan melepas ketergantungan pada pemanis berbahan baku tebu.



Dalam hidup, setiap orang pasti punya impian. Namun, tidak banyak yang berani untuk benar-benar mengejar impian mereka, apalagi ketika itu melibatkan tantangan dan risiko besar. Listi Sukmawati, seorang mahasiswa Master of Public Health (MPH) dari Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada (FK-KMK UGM) adalah contoh nyata bagaimana keberanian mengambil langkah besar untuk membawa perubahan yang luar biasa.

Keinginan Listi untuk berkontribusi dalam dunia kesehatan masyarakat terwujud lewat produk inovatif bernama Glucosweet. Produk tersebut merupakan pemanis

alternatif berbahan dasar singkong yang memiliki potensi besar di pasar makanan dan minuman sehat.

Glucosweet bukan hanya sebuah produk pemanis biasa. Ini adalah hasil dari pemikiran mendalam Listi mengenai masalah kesehatan yang dihadapi masyarakat modern, terutama yang berkaitan dengan konsumsi gula berlebihan. Seperti yang kita ketahui, konsumsi gula berlebih dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan, seperti diabetes, obesitas, dan gangguan metabolik lainnya.

Listi yang memiliki latar belakang di bidang kesehatan masyarakat merasa terpanggil untuk menciptakan sebuah solusi yang dapat memberikan manfaat bagi banyak orang. Glucosweet hadir sebagai alternatif pengganti gula tebu. Dengan bahan baku utama singkong yang tentunya lebih terjangkau dan ramah lingkungan. "Gula dari singkong ini rendah kalori dan lebih sehat dibandingkan dengan gula tebu biasa," kata Listi menjelaskan tentang produk inovasinya.

Dengan menggunakan bahan alami yang melimpah di Indonesia, ia berharap dapat membantu mengurangi ketergantungan pada gula tebu yang sering kali menimbulkan dampak buruk bagi kesehatan. Singkong sendiri, sebagai bahan dasar utama, memiliki sejumlah kelebihan, antara lain ketersediaan yang melimpah dan kemampuan untuk mendukung ketahanan pangan.

Proses Inovasi

Seperti inovasi lainnya, perjalanan mewujudkan Glucosweet bukanlah hal yang mudah bagi Listi. Dari tahap ide hingga produk jadi, ada berbagai tantangan yang harus dihadapi. Salah satu tantangan terbesar adalah memastikan produk yang dihasilkan tidak hanya enak, tetapi juga aman dan sehat.

Produk ini memiliki tingkat kemanisan dua kali lipat dibandingkan dengan gula pasir biasa, sehingga penggunaannya bisa lebih hemat dan membantu mengurangi konsumsi gula berlebih. Untuk itu, Glucosweet diproduksi

menggunakan enzim alami 100 persen, sehingga membuat lebih sehat dibandingkan produk pemanis lainnya yang beredar di pasaran.

Di Banjarnegara, Jawa Tengah, Sari Tela Utama sebuah perusahaan yang dipimpin Djohan Irawan menjadi mitra produksi utama dalam pembuatan Glucosweet. Kerja sama ini merupakan contoh kolaborasi yang sangat baik antara akademisi dan industri. Ini membuktikan inovasi yang dihasilkan dunia pendidikan bisa langsung diterapkan di masyarakat.

Sari Tela Utama sendiri memiliki izin produksi yang lengkap, termasuk sertifikasi Halal dari LPPOM MUI dan izin edar dari BPOM RI, sehingga konsumen bisa merasa aman mengonsumsi Glucosweet. Tidak hanya mengutamakan rasa, Glucosweet hadir dengan tujuan mulia untuk memberikan alternatif pemanis yang lebih sehat bagi masyarakat Indonesia.

Dalam dunia yang semakin peduli terhadap gaya hidup sehat, Glucosweet menjadi pilihan tepat bagi mereka yang ingin mengurangi asupan gula, tanpa harus mengorbankan rasa manis yang mereka sukai. "Rasanya lezat dan nyaman di tenggorokan, cocok untuk berbagai produk olahan makanan dan minuman," kata Listi yang dengan bangga melihat produknya diterima pasar.

Glucosweet bukan hanya sekadar produk yang memberikan solusi untuk pengurangan konsumsi gula, tetapi juga mendukung gaya hidup sehat yang lebih alami. Dengan kalori yang lebih rendah, produk ini sangat cocok untuk yang sedang menjalani diet rendah kalori atau menjaga kadar gula darah mereka.

Pemasarannya yang kini semakin meluas, mulai dari produk jamu, makanan sehat, hingga kue basah dan kering, semakin membuktikan Glucosweet punya potensi besar untuk diterima masyarakat luas. Tak hanya itu, Listi dan tim Glucosweet juga aktif mengikuti berbagai ajang pameran dan business matching, baik di dalam negeri maupun luar negeri. Hal ini dilakukan untuk memperluas

cakupan pasar dan memperkenalkan produk Glucosweet ke khalayak yang lebih luas.

"Kami ingin agar Glucosweet bisa dikenal lebih luas, baik di pasar domestik maupun internasional," tambahnya. Usaha keras ini tentunya akan membuka peluang bagi Glucosweet untuk berkembang lebih pesat lagi.

Meskipun sudah meraih beberapa pencapaian besar, Listi sadar perjalanan Glucosweet masih panjang. Industri makanan dan minuman yang terus berkembang menuntut adanya inovasi berkelanjutan. Karena itu, Listi dan timnya terus bekerja keras mengembangkan produk yang lebih baik, serta meningkatkan jangkauan pasar mereka.

"Kami ingin Glucosweet menjadi pilihan utama bagi konsumen yang menginginkan produk makanan dan minuman yang lebih sehat dan alami," kata Listi. Ke depannya, ia berharap produknya ini tidak hanya menjadi pilihan terbaik bagi konsumen di Indonesia, tapi juga bisa merambah pasar internasional.

Dengan kualitas produk yang terjamin dan inovasi yang terus berkembang, Glucosweet punya potensi besar untuk menjadi pemimpin di industri pemanis alami. "Kami ingin menjadi bagian dari perubahan dalam dunia makanan dan minuman, memberikan pilihan yang lebih sehat dan ramah lingkungan bagi masyarakat," pungkasnya.

Di balik setiap produk sukses, ada sebuah cerita yang penuh dengan kerja keras, visi, dan impian besar. Listi Sukmawati, melalui Glucosweet, tidak hanya menciptakan sebuah produk pemanis, tetapi juga membangun sebuah gerakan yang lebih besar, yaitu untuk hidup sehat secara alami. Dengan pendekatan yang inovatif dan berkelanjutan, Glucosweet bisa menjadi salah satu pionir dalam perubahan gaya hidup sehat di Indonesia. **PPID UGM/Gsh/Yul**



Daun Ketapang, Tukin dan Peternak Gurem

Oleh: **Suhubdy Yasin***

Halanya dari sehelai daun, ia mengikhtiar hidupnya. Terdapat banyak fungsi daun. Selain menjadi dapur tetumbuhan, juga banyak sekali fungsi lainnya. Mulai dari dijadikan pembungkus makanan, bahan farmaka, payung, dan/atau sebagai makanan ternak (pakan).

Pagi ini, seorang peternak yang sedang memelihara sepasang ternak kambing (prakiraan berumur 6 bulan), di pagi buta, sudah berangkat dari pondoknya memburuh dedaunan untuk pakan kambingnya. Rutinitas seperti itu, setiap pagi dan sore berjalan kaki, ditemani oleh sebatang bambu yang menjadi pegangan pisau aritnya. Si Udin (bukan nama sebenarnya) sudah berkeliling ke tempat yang mungkin ia dapat memetik dedaunan. Karena ternak piaraannya adalah kambing (browser: peramban), maka pilihannya adalah daun dari pepohonan.

Tak urung lagi, ia ketemu dengan pohon ketapang (*Terminalia catappa*) yang rindang dan daunnya hijau royo-royo karena kebetulan saat ini sedang musim penghujan.

Dia potong cabang dan/atau ranting yang berdaun lebat. Setelah dirasa cukup, ia mengemas dan diikat semua batang/rantingnya. Selanjutnya, ia pulang dengan membawa seikat daun ketapang yang diperkirakan memadai sebagai

diet ternak kambingnya. Dia tidak serakah memotong semua daun muda yang ada di hadapan matanya. Ia berpikir tentang hari esok yang mesti kembali ke pohon yang sama untuk 3 hari cadangan pakannya.

Ia pulang dengan bahagia sambil tersenyum lepas karena di pundaknya terbeban keluarga kecil yang menanti kedatangannya di rumah (isteri, seorang anak perempuan berumur 4 thn, dan 2 ekor kambingnya yang jantan dan betina). Pekerjaan yang sama, diulangi setiap pagi dan sore dengan penuh imajinasi sederhana. Kelak di bulan Idul Adha (Idul Qurban) akan dapat menjual seekor kambing jantan yang akan dibeli oleh yang mempunyai untuk hewan qurban dengan harga fantastis.

Ia menghayal sambil tersenyum seolah-olah sudah menggenggam uang seratus ribu berwarna merah. Ia menghayal tentang baju baru daster isteri, uang sekolah putrinya yang akan masuk TK, dan sisanya akan diperuntukan membeli kambing betina berumur 6 bulan sebagai tambahan indukan.

Hayalannya sungguh sangat sederhana. Tidak seperti hayalansang ASN yang gaji tiap bulan mengalir ke rekeningnya. Apalagi ASN Dosen yang sedang membayangkan TUKIN yang jumlahnya melebihi yang dikhayalkan oleh si peternak kambing.

Setelah saya melakukan wawan-

cara singkat, si pemikul daun ketapang itu, pergi yang dihantarkan oleh pandangan mata saya yang sedikit berbinar. Hidup kadang tidak fair. Ada segelintir orang di negeri ini yang dengan bangga mengkorupsi aset (uang) negara bermilyar-milyar, ada ASN yang ke kantornya datang di pagi buta untuk menyeter mukanya ke tembok ajaib yang terpasang mesin dungu, perekam wajah ASN. Ting ting ting, OK, tanda ia hadir dan dengan cara yang sama dia datang lagi. Kondisi seperti itu ada yang menjulukinya pegawai negeri-705. Apa itu?, "absensi jam 07 pagi dan sore 17.00, di antara jam itu ybs tidak di kantor (0 artinya tidak ada di kantor). Tapi gajinya lumayan banyak. Semoga hal seperti itu, hanya dilakukan oleh segelintir pegawai rendahan, bukan GB, direktur, atau kepala bagian, dan pejabat.

Beda sekali dengan peternak kambing tadi. Tidak punya kantor, tidak ada golongan gajinya, tidak ada Tukin yang diharapkan, dan lain-lain tunjangan. Ia rela bergatal-gatalan oleh gigitan semut merah yang terikut di daun ketapang, dihiasi oleh orkestra perut keroncong karena belum sarapan, dan sudah basah dengan keringat sebelum ia mandi. Itulah perjuangan pahlawan kampung, yang mungkin juga berharap akan mendapat jatah nasi gratis untuk isterinya yang sedang hamil muda, dari Program Mercusuar "Makan Bergizi Gratis (MBG) yang

diperkirakan anggarannya 7,1T. Jika menyimak angka uangnya, mungkin juga si peternak itu tidak paham tentang T yang tertera di belakang angka Rp itu karena ia adalah salah satu dari warga yang putus sekolah (SD tidak tamat) dan isterinya pun demikian.

Hidupnya hanya disandarkan kepada kambing dan daun ketapang. Ia masih berharap, semoga pohon ketapang yang tumbuh liar di pinggir jalan raya itu, tidak dipankas oleh petugas PLN atau ditebang oleh petugas PU yang sedang memulai pelebaran jalan raya, sebagai proyek baru di awal tahun.

Demikianlah, secuil catatan teras di akhir pekan dengan harapan dan doa agar daun pohon ketapang dan pohon-pohon lain yang berkemungkinan menjadi sumber pakan masih tegak, tumbuhkembang, dan berdaun lebat. Karena dedaunan itu yang menjadi lembaran uang hayalan para pengangon ternak gurem.

Tulisan ini harus saya akhiri karena diganggu oleh bisingsnya bunyi seekor insek (takedek: bahasa Samawa, red), yang menurut tahayul orang kampung, bunyi itu menjadi penanda bahwa hari akan panas atau hujan akan mulai menyurut intensitasnya. Demikianlah sekelumit catatan teras di pagi ini, semoga bermakna.

***Penulis adalah pemerhati Dinamika Literasi dan Informasi Global.**

Singkong

Pemasaran singkong di Lampung sudah lama dalam keadaan tidak efisien. Puncaknya terjadi unjukrasa, yang dahulu tidak pernah terjadi tetapi menjadi semacam api dalam sekam. Padahal Lampung merupakan sentra produksi singkong utama di Indonesia. Pada tahun 2022, Lampung menghasilkan 6,7 juta ton umbi singkong segar atau sekitar 40% dari total produksi singkong nasional.

Dalam satu kajian tahun 80-an, dilaporkan petani yang menjual produknya ke pengolah besar tak pernah melihat langsung timbangan tapi hanya menerima laporan tonase, rafaksi yang ditentukan sepihak oleh pembeli dan sebuah kupon pembayaran yang harus diuangkan seminggu kemudian. Untuk mendapatkan pembayaran tunai mereka harus rela menerima potongan beberapa

persen dari jumlah yang seharusnya mereka dapatkan.

Kini pun penetapan harga dan rafaksi tidak selalu menjadi solusi bagi kedua belah pihak. Harga singkong yang disepakati melalui mediasi Pemerintah Provinsi Lampung pada 23 Desember 2024 sebesar Rp 1.400/kg dengan rafaksi maksimal 15% ternyata memberatkan bagi industri tapioka karena harga tapioka di pasar global terus menurun. Sejumlah pabrik tapioka besar memilih menghentikan kegiatan produksi sehingga tidak lagi membeli singkong dari petani tapi bahkan memilih impor.

Pada tahun 2018 Indonesia mengimpor 349,27 ribu ton singkong dari Thailand, tahun 2018 sebesar 300 ribu ton, dan tahun 2019 sebanyak 500 ribu ton. Pada tahun 2024 impor singkong mencapai US\$1,65 juta, dengan harga rata-rata US\$ 0,29 per kg (Rp 4.640/kg, dengan kurs US 1 = Rp 16.000), sementara di Indonesia harga tapioka Rp 11.326-19.782.

Dampaknya, produksi singkong di Lampung terus menurun dalam 10 tahun terakhir. Produksi tertinggi sebesar 9 juta ton pernah dicapai pada 2010 setelah itu terus menurun hingga 2022 kurang dari 7 juta ton. Bahkan, pada 2019 di bawah 5 juta ton, dengan produktivitas yang relatif rendah yaitu 22 ton/hektar, jauh lebih rendah dari potensi produktivitas yang bisa mencapai 60-80 ton per hektar.

Kemelut singkong di Lampung tidak hanya soal harga dan pemasaran, tetapi terkait dengan produktivitas dan kualitas, yang akhirnya kalah bersaing dengan produk impor. Pemasaran memang bermasalah. Penetapan kadar aci (rendemen) singkong dan besarnya rafaksi tidak menyelesaikan masalah. Diperlukan penataan seluruh rantai produksi, pemasaran dan distribusi. Singkatnya ekonomi komoditas yang disebut dalam lagu Koes Plus sebagai "tongkat kayu jadi tanaman"

ini memerlukan penanganan yang komprehensif. Harus diakui pertanaman singkong hampir tidak memperoleh pemeliharaan yang seharusnya oleh petani.

Dalam jangka panjang, selain kebijakan untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas, harus pula seiring dengan membangun kelembagaan pemasaran yang lebih transparan dan adil.

Dalam kaitan dengan diversifikasi pangan, sangat penting menjadikan singkong sebagai pangan strategis nasional, dan mendorong diversifikasi produk berbahan baku singkong yang begitu potensial untuk dikembangkan. Apakah program MBG tidak tergerak untuk mengenalkan sumber karbohidrat berbasis singkong?



Oleh: **Memed Gunawan**

Menakar Ketersediaan Bahan Baku Biodiesel Sawit

Bagi Bangsa Indonesia, industri kelapa sawit menjadi salah satu penyokong devisa negara yang sangat besar. Bahkan luasan lahan perkebunan sawit terus berkembang. Jika pada era pembukaan perkebunan sawit hanya sekitar 300 ribu ha, kini diperkirakan mencapai 17 juta ha dan lahan berijin belum ditanami diperkirakan 3 juta ha, sehingga total ada seluas 20 juta ha.



Jika sebelumnya minyak sawit semula hanya untuk memenuhi kebutuhan minyak goreng (pangan), maka kini telah diproses menjadi belasan produk Oleo Chemical dan Bahan Bakar kendaraan berupa biodiesel dan biogasoline (bensin sawit, avtur, gas). Perkembangan tersebut muncul akibat tekanan adanya luar negeri, yang membuat para ahli berpikir dan akhirnya menghasilkan BBM.

Dari hasil uji coba, ternyata BBM dari CPO lebih baik kualitasnya dari minyak fosil. Kualitas BBM antara lain dinyatakan dengan bilangan Cetane untuk biodiesel dan octane untuk biogasoline. Data menyebutkan, bilangan Cetane B-40 yang tahun 2025 beredar memiliki bilangan Cetan sekitar 51.2, kualitasnya sangat baik. Biofuel memiliki research octane number (RON) sampai 120, sedang Avtur 100 dan Pertamina 92. Artinya BBN lebih baik dari pada BBM dari fosil.

Jika ada yang mengatakan biosolar dapat merusak mesin, maka perlu ditanya lebih lanjut. Berapa banyak kendaraan yang rusak yang masuk bengkel? Kendaraan jenis apa saja yang rusak? Hal itu tidak dipungkiri kehadiran Biosolar ada bisnis yang terganggu.

Penulis sendiri memiliki SUV 4x4 diesel, dengan penggunaan sekitar 20.000 km/tahun, menggunakan biodiesel, tanpa kendala. Ganti filter solar setelah 50.000 km, ganti timing belt setelah 75.000 km, ganti filter udara setiap 10.000 km. Semuanya normal saja, padahal sudah digunakan hampir 7 tahun sejak dibeli.

Ketersediaan Bahan Baku

Namun permasalahan biodiesel secara nasional pada ketersediaan bahan baku, bukan masalah teknis engine dan kualitas biodiesel. Saat ini produktivitas minyak sawit di Indonesia rata-rata masih di bawah 36% (2,847 ton/ha). Perkebunan rakyat hanya 32% (2,559 ton/ha), perkebunan swasta nasional dan asing hanya 43% (3,443 ton/ha). Sementara perkebunan besar negara mencapai 51% (4,107 ton/ha).

Artinya perkebunan milik negara (BUMN) lebih baik. Sayangnya luasan sangat rendah hanya 3,5% dari total areal kelapa sawit di Indonesia. Bahan baku minyak sawit ini merupakan bahan pangan dan BBN yang sifatnya sangat strategis, tidak boleh didominasi swasta.

Karena itu, untuk memenuhi kebutuhan bahan baku biodiesel, produktivitas kebun kelapa sawit ini perlu ditingkatkan menjadi 70-80% dari potensinya. Produksi minyak sawit dapat digenjut dari sekitar 50 juta ton menjadi 100 juta ton dengan cara intensifikasi perawatan tanaman saja.

Upaya peningkatan produktivitas ini sangat mungkin, tapi perlu koordinasi yang intensif. Setidaknya ada 8 instansi yang terlibat yakni Kementerian Pertanian, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, PT Pertamina, BPD PKS, Kementerian ATR/BPN, Pemda dan Perbankan.

Dengan kebutuhan dalam negeri terus meningkat sejalan dengan meningkatnya campuran biosolar, hitungannya produksi minyak sawit hingga 100 juta ton juga tidak akan cukup. Apalagi, jika biofuel seperti Avtur dan Bensa sudah diproduksi

URAIAN	SOLAR FOSIL	BIO SOLAR DARI CPO	BIO SOLAR	
			B-40	B-100
Bilangan Setana	48	56	51.2	56
Kandungan Belerang	1.500	10	904	10
Viskositas (mm ² /s-suhu 20°C)	5	8	6.2	8

secara massal. Jadi, paling tidak produksi minyak sawit minimal menjadi 120-125 juta ton. Namun, dengan catatan ekspor dipertahankan sebanyak 25-30 juta ton.

Melihat potensi perkebunan yang sebenarnya tanpa penanaman areal pun, Indonesia dapat meningkatkan produksi minyak sawit hingga melebihi 100 juta ton, bahkan mencapai 300 juta ton. Konsumsi seluruh BBM sendiri tidak lebih dari 60 juta ton/tahun.

Strategi Peningkatan Produksi

Untuk bisa meningkatkan produksi minyak sawit dari 50 juta ton menjadi 100-150 juta ton, perlu ada langkah mengungkit produktivitas tanaman sawit dari 2.6 ton menjadi 8 ton/ha/tahun. Beberapa program yang dilakukan diantaranya, pemberian pupuk subsidi dari rerata 1 kg/pohon/tahun menjadi 8 kg/pohon/tahun, sehingga produktivitas akan meloncat naik.

Kemudian, penggunaan metoda *Production Force Management* yang memungkinkan produktivitas meningkat antara 60-100%. Saat ini diperkirakan ada 5-10% kebun kelapa sawit yang perlu pengendalian genangan airnya. Strategi lain yang perlu dilakukan adalah perbaikan jaringan jalan produksi, agar seluruh produksi dapat dikirim ke pabrik kelapa sawit dalam waktu sesingkat-singkatnya. Selanjutnya, mempercepat penanaman 3 juta yang telah berijin.

Ke depan, pemerintah perlu

memperkuat BUMN Perkebunan (PTPN), supaya memiliki luas diatas 10 juta ha. Saat ini luas areal sawit PTPN hanya 3,5% dari luas total kebun kelapa sawit di Indonesia.

Ada beberapa alternatif yakni memberikan penugasan kepada BUMN Perkebunan untuk mengambil alih perusahaan swasta yang terbengkalai dan perkebunan yang mengalami permasalahan dengan bank. Pemerintah juga dapat menugaskan, PTPN membuka lahan baru pada lahan tidur atau terlantar, serta membuka lahan baru pada areal eks hutan yang terbengkalai.

Untuk mengakomodasikan pengembangan biodiesel, pemerintah perlu membentuk BUMN BBN yang bertugas mengelola Biodiesel dan Biofuel. Sebaiknya PTPN konsentrasi dalam penyiapan bahan baku minyak sawit, sedangkan industri BBN ditangani BUMN Perindustrian.

Sedikitnya diperlukan 120 pabrik BBN untuk mengolah 60 juta KL BBM. Saat ini ada 24 perusahaan swasta yang memproduksi biodiesel sebanyak 16 juta ton/tahun. Sementara PTPN III, saat ini sedang membangun 1 pabrik dengan kapasitas 450.000 ton.

Sebagai kesimpulan, dapatlah dikatakan bahwa program B-100 ini dapat dilaksanakan, secara teknis maupun non teknis tidak ada masalah. Masalah utama adalah ketersediaan bahan baku minyak sawit. Tinggalkan kemauan.

Memet Hakim
(Senior Agronomis Kelapa Sawit)

Pertanian di Mata Antonius J. Supit



Bagi kalangan pebisnis dan dunia usaha siapa yang tak kenal dengan Antonius J. Supit? Menjadi Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) sejak Maret 2003 dan Ketua Gabungan Perusahaan Perunggasan Indonesia (GAPPI) sejak tahun 2002, membuat dirinya kerap menjadi salah satu narasumber dibanyak media massa.

Bersyukur, pada Jumat (24/1), Anton Supit, dirinya biasa disapa berkunjung ke kantor Tabloid Sinar Tani, di Gedung Arsip Kementerian Pertanian, Jakarta. Pada kesempatan tersebut, pimpinan Tabloid Sinar Tani berkesempatan melakukan podcast. Ada banyak hal yang diungkapkan, Anton yang kini Komisaris Utama PT. Sreeya Indonesia.

"Ketika berbicara tentang pertanian di Indonesia, kita tidak bisa lepas dari konteks demografi. Saat ini, sekitar 20-30% angkatan kerja Indonesia masih bergelut di sektor pertanian," katanya mengawali pemaparan mengenai potensi pertanian di Indonesia.

Dari perspektif sosial dan kemanusiaan, Anton Supit melihat angka ini menunjukkan bahwa hampir sepertiga rakyat Indonesia menggantungkan hidupnya pada sektor ini. Potensi ini, jika diberdayakan secara optimal, dapat menjadi kekuatan dan motor penggerak ekonomi yang luar biasa.

Namun, Anton Supit mengingatkan, besarnya angkatan kerja tersebut tidak mungkin terus-menerus menjadi sebuah kebanggaan. Jika bangsa Indonesia ingin memberdayakan potensi tersebut untuk pembangunan pertanian, maka menjadi kekuatan ekonomi cukup besar. "Tapi kita tidak bisa terus menerus menggondong kekuatan ekonomi dari angkatan kerja tersebut," ujarnya.

Anton Supit mencontohkan, seorang Profesor Cho Dong Sung dari Korea Selatan dengan teorinya mengungkap pada masa awal kemerdekaan Korea, lebih dari 90% angkatan kerja berada di sektor pertanian. Namun justru ia menilai situasi ini sangat tidak efisien, mengingat keterbatasan iklim dan teknologi.

Namun, lanjut Anton Supit, pada awal tahun 1980-an saat Profesor Cho Ding Sung ke Indonesia memberikan informasi bahwa sektor pertanian

di negerinya hanya menyerap 2% tenaga kerja, sementara manufaktur mencapai 20%, dan layanan (*services*) melesat ke 70%.

Transformasi ke Industri

Transformasi serupa terjadi di banyak negara maju, yang bergerak dari sektor pertanian ke industri, lalu ke sektor jasa dan teknologi informasi. Sayangnya pertanian Indonesia masih bergulat masalah klasik. "Saat negara lain sudah bergerak ke jasa

Karawang, Jawa Barat, sebagai sentra produksi pangan, khususnya padi, apakah petaninya sudah makmur. Nah, dengan kondisi tersebut, Komisaris Utama PT Sreeya Indonesia ini dengan tegas menyebutkan agar Tabloid Sinar Tani menjadi bagian dari pemerintah dalam memberikan masukan apa yang terjadi di lapangan.

Berbagai hal menurut Anton Supit, perlu segera dibenahi. Salah satunya komoditas jagung yang saat

Ini sesuatu yang membingungkan," katanya.

Mengubah Pola Pikir

Mengingat persnyataan seorang Profesor ahli perdagangan yang pernah menyatakan bahwa transformasi ekonomi hanya mungkin terjadi jika kita mengubah pola pikir dari "bangsa siaga" menjadi "bangsa niaga". Professor tersebut mempelajari Jepang, Korea, dan Taiwan, pedagangannya yang membuat mereka besar.

"Kita ini masih menjadi masyarakat siaga. Larang melarang. Ini itu dilarang. Seharunya, kita perlu menggunakan instrumen ekonomi yang tepat, insentif dan disinsentif," ujarnya. Jadi ke depan, Anton Supit berharap peran Sinar Tani penting untuk menyuarakan kondisi riil di lapangan yang kini terjadi kevakuman. Untuk itu, ia menyarankan, Tabloid Sinar Tani merangkul *stakeholder* pertanian, tidak hanya pangan, tapi perkebunan dan hortikultura.

Anton Supit juga menyoroti soal kebijakan pemerintah yang membuka lahan pertanian di lahan rawa gambut di Kalimantan sudah sesuai untuk budidaya padi. Pasalnya, dari hasil pengujian ahli padi dari China, lahan tersebut kurang cocok untuk pertanaman padi, karena kadar asamnya tinggi. "Apakah tujuan kita meningkatkan produksi hanya dengan eskstensifikasi?" ujarnya.

Padahal Anton Supit mencontohkan di komoditas jagung dengan benih unggul dapat meningkatkan produksi dari 5 ton menjadi 10 ton/ha. Bahkan Turki menjadi negara yang produktivitas jagung sangat tinggi hingga 13 ton/ha dengan penggunaan benih unggul. Contoh lain komoditas kentang. Negara lain mampu memproduksi kentang hingga 40 ton/ha, sementara Indonesia baru mencapai 15 ton/ha.

"Bagaimana kita bisa bersaing. Di sinilah pentingnya implementasi teknologi untuk meningkatkan produksi pangan. Peran pemerintah penting, tapi jangan lupakan juga swasta," katanya. **Herman/Yul**



Anton Supit bersama Pemimpin Umum Sinar Tani Dr. Ir. Memed Gunawan (kiri) dan Pemimpin Perusahaan, Ir. Mulyono Machmur (kanan)

dan teknologi, kita belum beres mengurus pertanian," ujarnya.

Sebagai seorang yang juga bergelut dibidang ketenaga kerjaan yakni pengurus APINDO, Anton Supit membandingkan dengan kondisi buruh industri. Bisa dibilang, nasib buruh di Indonesia tidak begitu baik. Tapi jika dibandingkan dengan kondisi petani Indonesia, maka kondisi buruh lebih baik.

"Petani kita menghadapi ketidakpastian. Petani bergulat dengan musim, apakah bisa sukses atau tidak, hingga harga yang anjlok saat panen raya," katanya. Karena itu dirinya mempunyai harapan besar terhadap Pemerintah Presiden Prabowo Subianto bukan hanya untuk mencapai ketahanan pangan, tapi juga meningkatkan taraf hidup petani.

Anton Supit mencontohkan, di

dirinya dalam. Kebutuhan jagung untuk pakan ternak mencapai 8-9 juta ton/tahun. Meski secara total produksi jagung dalam negeri cukup, tapi distribusi yang tidak merata sering kali menjadi masalah bagi industri pakan ternak.

Pada masa panen raya November hingga April, produksi jagung nasional diakui bisa mencapai 60%. Jika total produksi jagung berdasarkan data pemerintah mencapai 20 juta ton, maka pada saat panen raya akan mencapai 12 juta ton jagung. Karena kapasitas gudang yang terbatas menyebabkan banyak hasil panen tidak terserap optimal. "Tapi pada bulan tertentu saat tidak ada panen, kita kekurangan. Sekarang keluar kebijakan jika kekurangan kita tidak boleh impor jagung, tapi gandum.

Wawancara dengan Menteri Perdagangan, **Budi Santoso**:

UMKM pun Bisa Ekspor

Banyak kalangan pelaku usaha UMKM pesimis bahwa produknya tak bisa menembus pasar global. Untuk menampik rasa pesimis tersebut, Kementerian Perdagangan di bawah kepemimpinan Budi Santoso siap membantu pelaku usaha skala kecil dan menengah agar produk mereka melanglang buana di pasar internasional. Seperti apa programnya? Berikut wawancara Tabloid Sinar Tani dengan Busan, sapaan akrab Menteri Perdagangan.



Secara umum program prioritas Kementerian Perdagangan saat ini?

Setidaknya ada tiga program kerja Kementerian Perdagangan merupakan bagian dari Program *Quick Wins* Kementerian di Bidang Perekonomian. Ketiga program kerja tersebut, yaitu Pengamanan Pasar Dalam Negeri, Perluasan Pasar Ekspor, dan Peningkatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Berani Inovasi, Siap Adaptasi Ekspor (UMKM BISA Ekspor).

Untuk Program Kerja Pengamanan Pasar Dalam Negeri, diantaranya dengan mempercepat pemanfaatan pasar yang telah dibangun sehingga dapat berfungsi secara optimal dan memberikan manfaat ekonomi bagi semua pihak. Selain itu, juga penyelesaian *trade remedies* untuk mengurangi potensi kerugian dan melindungi industri dalam negeri dari membanjirnya impor dan impor yang tidak adil.

Sedangkan Program Kerja Perluasan Pasar Ekspor, kami menargetkan penyelesaian tiga perundingan perdagangan bilateral Indonesia dengan tiga negara mitra, yaitu Kanada, Eurasia, dan Peru. Selain itu, kami juga menargetkan penyelesaian perundingan CEPA antara Indonesia dan Uni Eropa (IEU—CEPA) pada tahun 2025. Seluruh perjanjian perdagangan diharapkan dapat meningkatkan daya saing produk ekspor nasional dan memperluas pasar ekspor Indonesia.

Pada Program Kerja UMKM BISA Ekspor, kami menetapkan lima target, yaitu pengembangan ekosistem UMKM ekspor, pembentukan dua pusat ekspor baru di luar Pulau Jawa. Selain itu, tercetaknya 100 UMKM ekspor hasil program UMKM BISA Ekspor, tercapainya 600 UMKM yang mendapatkan pelatihan ekspor,

serta optimalisasi peran perwakilan perdagangan dalam promosi ekspor UMKM.

Kami tertarik dengan program UMKM BISA Ekspor, bisa Bapak jelaskan lebih rinci?

Dari sisi perdagangan domestik, Kemendag memiliki berbagai program dan kebijakan insentif untuk mendukung petani dan peternak kecil agar lebih kompetitif di pasar lokal maupun internasional. Dalam program UMKM BISA Ekspor, Kemendag terus mendorong pelaku usaha kecil memenuhi standar internasional, seperti HACCP (*Hazard Analysis Critical Control Point*), ISO, atau sertifikasi organik, sehingga produk mereka dapat masuk ke pasar global. Hal ini dikelola melalui kolaborasi dengan pelaku usaha dan instansi terkait.

Melalui perwakilan perdagangan di luar negeri yakni Atase Perdagangan dan Indonesian Trade Promotion Center (APITPC), mempromosikan produk lokal petani dan peternak kecil ke pasar internasional. Dengan keberlanjutan program-program ini, diharapkan dapat meningkatkan daya saing petani dan peternak kecil di pasar lokal maupun internasional, meningkatkan kesejahteraan petani dan peternak kecil, serta berkontribusi pada ketahanan pangan nasional. Beberapa hal yang relevan, misalnya, komunikasi Kemendag dengan asosiasi, pelaku usaha pusat distribusi, dan pasar ritel untuk mendukung produk lokal agar dapat dijual di berbagai gerai.

Agenda apa saja ketika UMKM mengikuti program tersebut?

Saat ini Kementerian Perdagangan melalui program UMKM BISA (Berani Inovasi, Siap Adaptasi) Ekspor mendorong transformasi UMKM

menjadi pelaku ekspor yang handal. Program ini dirancang untuk membantu UMKM mengatasi hambatan ekspor, memahami pasar global, dan memanfaatkan peluang perdagangan internasional. Harus diakui, UMKM bukan hanya tulang punggung perekonomian dalam negeri, tetapi juga memiliki potensi besar untuk berkontribusi terhadap ekspor nasional. Kami optimis UMKM Indonesia akan terus tumbuh dan memberikan dampak positif bagi perekonomian Indonesia.

Melalui program tersebut, pelaku usaha produk pertanian dan peternakan dapat mengikuti beberapa agenda kegiatan Promosi Dagang 2025 yang akan dikoordinasikan Kementerian Perdagangan. Diantaranya 173 pameran dagang internasional dan misi dagang di 5 negara. Selain itu, secara rutin akan dilakukan kegiatan *business matching* setiap bulan termasuk produk pertanian dan peternakan, baik secara daring maupun luring, dengan melibatkan perwakilan perdagangan di luar negeri di 32 negara.

Apakah ada program insentif untuk mendukung petani dan peternak kecil agar lebih kompetitif di pasar internasional?

Pada tataran perdagangan internasional, skema kerja sama multilateral organisasi Perdagangan Dunia (WTO) memiliki *Agreement on Agriculture*. Mekanisme ini dapat dimanfaatkan Indonesia di WTO untuk produk pertanian. Mekanisme mencakup fasilitas *Tariff Rate Quota* (TRQ), *Agriculture Special Safeguard* (SSG), pemanfaatan bantuan/subsidi domestik untuk mendukung petani kecil, serta intervensi harga oleh pemerintah untuk makanan pokok.

Terkait kebijakan impor komoditas pertanian, apakah ada strategi untuk melindungi petani agar terhindar dari persaingan yang tidak sehat?

Pemerintah mempunyai instrumen kebijakan pengamanan perdagangan, seperti Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) dan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) yang dapat digunakan untuk melindungi industri dalam negeri, termasuk industri di sektor pertanian. Penerapan BMAD pada produk pertanian yang terbukti melakukan dumping diharapkan dapat mengembalikan *level of playing field* yang sama antara produk lokal dan produk impor, sehingga produk lokal dapat bersaing secara sehat dengan produk impor.

Sebelumnya Indonesia pernah menerapkan BMAD pada produk pertanian, yakni pisang cavendish asal Filipina. Pengenaan BMAD berlangsung selama 5 tahun sejak 17 November 2011 dengan besaran BMAD sebesar 35 persen. Selain tindakan pengamanan, saat ini pemerintah juga sudah menggunakan Neraca Komoditas untuk mengatur impor komoditas pertanian.

Penggunaan Neraca Komoditas (NK) penting untuk mengintegrasikan data di setiap Kementerian/Lembaga (K/L) terkait untuk memastikan kebutuhan dan ketersediaan komoditas strategis di dalam negeri setiap tahunnya, termasuk komoditas pertanian seperti beras, gula, dan jagung secara nasional. Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan transparansi, akurasi data, dan mendukung pengambilan keputusan yang lebih efektif sehingga impor tidak merugikan produsen di dalam negeri. **Tim Sinta**

Wiyono Buktikan Bertani Hortikultura Bisa Kaya Raya

Siapa bilang bertani tak bisa kaya? Wiyono membuktikan sebaliknya! Dengan kerja keras dan inovasi di bidang hortikultura, ia sukses meraup omzet Rp 500 juta dari tanah Dumai. Bagaimana caranya?

Kota Dumai, yang lebih dikenal sebagai pusat industri dan pelabuhan di pesisir timur Sumatera, ternyata menyimpan potensi pertanian yang besar. Di tengah hiruk-pikuk aktivitas industri, masih terdapat area persawahan seluas 233 hektare di Kecamatan Dumai Timur dan Sungai Sembilan.

Selain itu, di Kelurahan Tanjung Penyembal, Kecamatan Sungai Sembilan, terdapat lahan seluas 4 hektare yang kini menjadi pusat pengembangan hortikultura oleh pemuda lokal.

Potensi inilah yang dilihat oleh Wiyono, seorang pemuda yang tak hanya bertani, tetapi juga menggerakkan perubahan besar di sektor pertanian Dumai.

Sebagai Duta Petani Milenial

(DPM) Kementerian Pertanian RI sejak 2020, ia membuktikan bahwa bertani bukan sekadar profesi biasa, melainkan peluang besar untuk mencapai kesuksesan finansial. Melalui inovasi dan kerja keras, ia mampu meraup omzet hingga Rp 500 juta per tahun dari hasil pertaniannya.

Wiyono awalnya hanya menekuni pertanian sebagai hobi. Namun, seiring waktu, ia menyadari bahwa sektor ini memiliki potensi luar biasa, baik dalam hal keuntungan maupun dampak sosial.

Berbekal tekad kuat, ia mulai mengelola lahan di Dumai dan menanam berbagai komoditas hortikultura seperti cabai merah, cabai rawit, bawang merah, kacang panjang, jagung, sawi caisim, pakcoy, bayam, dan kangkung.

Rotasi tanaman menjadi strategi utamanya untuk menjaga stabilitas

produksi sepanjang tahun. Dengan pendekatan ini, hasil panen bisa lebih optimal dan permintaan pasar tetap terpenuhi. Berkat keberhasilannya, ia terpilih sebagai Koordinator Wilayah Riau dalam program Duta Petani Milenial.

"Tidak mudah menjadi petani sukses. Harus ada inovasi, ketekunan, dan strategi pemasaran yang tepat," ujar Wiyono.

Ia menjelaskan bahwa untuk lolos sebagai Duta Petani Milenial, ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi, seperti pengalaman bertani minimal dua tahun, omzet minimal Rp10 juta per bulan, kemampuan dalam meregenerasi petani muda, serta memiliki jaringan kemitraan dengan pelaku usaha lain.

Kesuksesan Wiyono tidak hanya terletak pada keahliannya dalam bertani, tetapi juga kemampuannya dalam memanfaatkan teknologi digital dan Internet of Things (IoT). Ia menerapkan teknologi ini untuk meningkatkan efisiensi dalam mengelola lahan dan memantau pertumbuhan tanaman secara real-time.



"IoT memungkinkan kami untuk mengontrol dan mengawasi pertanian langsung dari gawai. Kami bisa melihat kondisi lahan, kelembapan tanah, hingga suhu udara tanpa harus selalu turun ke lapangan," jelasnya.

Selain itu, ia juga memanfaatkan media sosial seperti Instagram, Facebook, dan YouTube untuk memasarkan produk serta berbagi edukasi kepada petani muda. Dengan pendekatan digital ini, pemasaran hasil pertanian menjadi lebih luas dan lebih efisien.

Nattasya/Ges

AGRI TIPS

Cara Menyelamatkan Cabai Saat Hujan

Musim hujan sering kali menjadi tantangan bagi petani cabai. Tanaman ini rentan terhadap kelembapan berlebih, yang dapat menyebabkan akar busuk, serangan hama, dan penyakit seperti antraknosa atau patek. Jika tidak segera ditangani, hujan deras bisa menghambat pertumbuhan bahkan menyebabkan tanaman mati. Oleh karena itu, ada beberapa langkah penting yang bisa dilakukan untuk menyelamatkan cabai saat musim hujan.

Langkah pertama adalah memastikan drainase lahan bekerja dengan baik. Air yang menggenang di sekitar akar bisa menjadi penyebab utama pembusukan. Untuk mencegah hal ini, buatlah bedengan dengan ketinggian sekitar 20-30 cm agar air hujan tidak menggenang di sekitar tanaman. Selain itu, penggunaan mulsa plastik atau jerami sangat dianjurkan karena dapat membantu menjaga kelembapan tanah tetap stabil dan mengurangi percikan air yang bisa menyebarkan penyakit.

Selain itu, pemangkasan daun yang terlalu rimbun juga penting dilakukan. Tanaman cabai yang terlalu lebat akan menahan kelembapan tinggi, menciptakan lingkungan ideal bagi jamur dan bakteri. Dengan memangkas beberapa daun yang tidak perlu, sirkulasi udara di sekitar tanaman menjadi lebih baik, sehingga risiko serangan penyakit berkurang.



Penggunaan fungisida dan pestisida alami juga bisa menjadi solusi untuk melindungi cabai dari hama dan penyakit. Fungisida berbahan aktif mancozeb atau tembaga hidroksida dapat membantu mengatasi jamur, sementara pestisida alami seperti ekstrak bawang putih atau neem oil bisa digunakan untuk mengendalikan hama seperti kutu daun dan ulat.

Selain perlindungan dari penyakit, pemupukan juga perlu diperhatikan. Saat musim hujan, hindari pemberian pupuk berlebihan karena bisa terlarut dan terbuang percuma. Gunakan pupuk slow release atau pupuk cair yang diberikan setelah hujan reda agar lebih efektif.

Dengan perawatan yang tepat, tanaman cabai bisa tetap bertahan dan tumbuh subur meskipun di tengah musim hujan. Pastikan untuk rutin mengecek kondisi tanaman agar tindakan pencegahan bisa dilakukan sebelum masalah semakin parah.

Nattasya

PUPUK ORGANIK CAIR

EM4TM
EFFECTIVE MICROORGANISMS 4

HEMAT BIAYA
PANEN BERLIPAT
GANDA

EM
EMRO

TEKNOLOGI FERMENTASI BAHAN ORGANIK BERMANFAAT UNTUK:

- Memperbaiki sifat biologis, fisik dan kimia tanah.
- Meningkatkan produksi tanaman dan menjaga kestabilan produksi
- Memfermentasikan bahan organik tanah dan mempercepat dekomposisi.
- Meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil pertanian yang berwawasan lingkungan.
- Meningkatkan keragaman mikroba yang menguntungkan di dalam tanah.
- Meningkatkan ketersediaan nutrisi dan senyawa organik dalam tanah.
- Meningkatkan Fixasi Nitrogen/Bintil akar.
- Dapat mengurangi kebutuhan pupuk kimia dan pestisida.
- Dapat digunakan untuk semua jenis tanaman dan tanah.
- Pembuatan pestisida organik
- Pembuatan kompos bokashi.



L958/HAYATI/DEPTAN-PPVTPP/VIII/2011

Kadar Hara Pupuk

C organik = 27,05 % ; pH = 3,90 ;
N = 0,07 % ; P₂O₅ = 3,22 ppm;
K₂O = 7675,0 ppm; Ca = 1676,25;
Mg = 597,0 ppm; B < 20 ppm;
Cu < 0,01 ppm; Mn = 3,29 ppm;
Fe = 5,54 ppm; Zn = 1,90 ppm;

Mikroba:

Lactobacillus = 8,7 x 10⁵ sel/ml;
Pelarut Fosfat = 7,5 x 10⁶ sel/ml;
Yeast/Khamir = 8,5 x 10⁶ sel/ml;

Diproduksi dan Dipasarkan
PT. SONGGOLANGIT PERSADA

KANTOR PEMASARAN :

JAKARTA & SUMATERA : Telp. (021) 78833766 & 78834091 Fax : (021) 78833766
E-mail : agoes_em4@yahoo.com, slpjakarta@em4-indonesia.com
JAWA TENGAH : Telp & Fax : (0293) 326593 E-mail : slpjateng@em4-indonesia.com
JAWA TIMUR : Telp & Fax : (031) 7405203 E-mail : slpjatim@em4-indonesia.com
BALI : Telp & Fax : (0361) 8424066 E-mail : slpbali@em4-indonesia.com

Web: www.em4-indonesia.com

Email : bokashiok@yahoo.com

ADVANCED TECHNOLOGY TOWARDS NATURE FARMING



Kami hadir bukan hanya untuk hari ini, tapi untuk mendampingi Anda dalam perjalanan jangka panjang

- Konsultasi komprehensif
- Pelaksanaan yang terencana
- Dukungan purna jual yang responsif

Untuk layanan & informasi lebih lanjut hubungi Customer Call Center PT RUTAN :

CUSTOMER CALL CENTER PT RUTAN
0811 3225 9900

PT RUTAN | Solusi Pangan Indonesia

rutantpt www.rutan.co.id



KEMENTERIAN PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

RAJA AsliBos SURYA QUA bimtek Bimbingan Teknis

WEBINAR
OPTIMALISASI SAPRODI MENUJU SWASEMBADA BERSAMA BRIGADE PANGAN

Keynote Speaker
Sudaryono B.Eng., M.M, MBA
Wakil Menteri Pertanian RI

Dr. Idha Widi Arsanti, SP., MP.
Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP)

Andi Nur Alam Syah, S.TP., M.T
Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian RI

Dedy Supriadi, S.P., M.Si.
Chief Executive Officer (CEO) PT RESTU AGROPRO JAYA MAS

Ardiyanto Indrakusuma S.ST
Direktur Utama PT Suryaqua (Pompa Tenaga Surya)

Roderick Bastian
AsliBos Teknologi Berantas Mafia Pupuk

09.00 - 12.00 WIB
Rabu, 5 Februari 2025

Sinartani News Room, Jakarta

Dipandu Oleh :

HOST
Dr. Ir. Memed Gunawan
Pemimpin Umum Sinar Tani

MODERATOR
Ir. Mulyono Machmur, MS
Pemimpin Perusahaan Sinar Tani

zoom
webinar.tabloidsinartani.com
Meeting ID : 840 7616 3208
Password : saprodi

SinarTani
SINTA TV Sinartani

LIVE ON: SINTA TV Tabloidsinartani.com

Sasar Lahan Kering, Padi Gogo Sokong Produksi Pangan

Selain lahan rawa, lahan kering juga menjadi sasaran pemerintah dalam upaya perluasan areal tanam. Dengan menggunakan benih padi gogo, lahan kering kini ikut menyokong peningkatan produksi pangan.



Pemanfaatan lahan kering untuk budidaya padi gogo telah dilakukan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur dan Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur yang melakukan gelar tanam perdana integrasi padi gogo di lahan perhutanan sosial Kelompok Tani Hutan (KTH) Alas, Desa Penanggungan, Kecamatan Trawas, Kabupaten Mojokerto, Jumat (10/1).

Ketua KTH Alas, Slamet menyatakan dukungan penuh masyarakat terhadap program pencapaian swasembada pangan dengan memanfaatkan lahan perhutanan untuk budidaya padi. "Kami mengucapkan terima kasih atas bantuan benih padi gogo yang telah diberikan kepada KTH Alas. Insya Allah, kami siap menyukseskan program swasembada pangan ini," ujarnya.

Kabupaten Mojokerto memang memiliki potensi lahan kering yang luas. Masyarakatnya juga sudah terbiasa menanam padi gogo. Dari total 114 ha lahan KPH Alas yang tersedia, sebagian besar sudah siap untuk penanaman padi gogo.

Budidaya padi gogo di lahan kering juga dilakukan di Desa Margatirta, Kecamatan Cimarga, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Kegiatan tersebut dilakukan bersama Kepala Desa Margatirta, Ketua Kelompok Tani Lestari Alam, Koordinator BPP Pertanian Kecamatan Cimarga dan Petugas Lapangan, Jum'at (17/1).

Ketua Kelompok Tani Lestari Alam, Odon menjelaskan, tanaman padi gogo yang ditanam pada Oktober 2024 lalu di lahan wilayah binaannya seluas 40 ha kini sudah berumur mencapai 99 hari. Petani menggunakan varietas padi gogo IPB 9G bantuan pemerintah. "Kami berharap musim berikutnya petani bisa memberikan bantuan saprodi

lain yang diperlukan, seperti kopi dan kelapa, agar petani dapat meningkatkan nilai tambah penghasilan selain tanaman padi gogo," tuturnya.

Plt. Direktur Jenderal Perkebunan Kementan, Heru Tri Widarto mengatakan, pihaknya berupaya mendukung program swasembada pangan dengan penanaman padi gogo di lahan perkebunan, seperti di kebun kelapa sawit, di sela tanaman kopi, dan lainnya. Hal ini sebagai bentuk komitmen sektor perkebunan untuk memperkuat ketahanan pangan nasional di masa mendatang.

Dengan program penanaman padi gogo tersebut, Heru berharap dapat mempercepat pencapaian swasembada pangan di Indonesia. Program ini diharapkan tidak hanya meningkatkan produksi pangan lokal, tapi juga memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan petani. "Pemerintah terus berupaya untuk mendorong peningkatan produksi padi khususnya di lahan-lahan kering yang selama ini belum dimanfaatkan secara maksimal untuk pertanian," katanya.

Heru mengakui, untuk mewujudkan swasembada pangan tidaklah mudah, harus dilakukan bersama dan menjaga komitmen. Untuk itu perlunya menjalin kerja sama yang baik dengan berbagai pihak terkait, demi keberhasilan keberlanjutan pertanian. "Sangat dibutuhkan kolaborasi dengan berbagai pihak dan memastikan semuanya berjalan dengan baik sesuai target dan aturan yang berlaku," tegasnya.

Mengenal Padi Gogo

Padi gogo adalah jenis padi yang berbeda dari padi pada umumnya.

Padi gogo tidak ditanam di sawah yang memerlukan pengairan yang banyak, melainkan bisa ditanam di lahan perkebunan kebun atau ladang dengan sistem tumpang sari. Dengan cara tersebut, budidaya padi gogo selain meningkatkan efisiensi lahan, juga dapat membantu pendapatan masyarakat sekitar perkebunan/hutan, karena petani mendapat hasil padi sebelum tanaman pokok menghasilkan.

Salah satu kelebihan padi gogo ketimbangan varietas padi yang umumnya dibudidayakan di lahan sawah adalah tidak memerlukan irigasi khusus. Dengan demikian padi gogo cocok untuk ditanam di daerah yang kekurangan air atau yang tidak memiliki sistem irigasi yang baik.

Banyak varietas padi gogo yang merupakan jenis padi lokal yang sudah beradaptasi dengan lingkungan setempat. Ini membuatnya lebih tahan terhadap hama penyakit dan kondisi lingkungan tertentu.

Varietas padi gogo lokal yang berasal dari Kalimantan hingga kini masih diminati petani karena daya adaptifnya yang baik. Diantaranya, varietas Buyung, Cantik, Katumping, Sabai dan Sasak Jalan. Begitu juga varietas lokal di Pulau Sumatera seperti Arias, Simaritik, Napa, Jangkong, Klemas, Gando, Seratus Malam.

Kelebihannya varietas lokal mempunyai rasa enak yang sesuai dengan etnis daerah setempat. Selain itu varietas lokal toleran terhadap keadaan lahan yang marjinal, tahan terhadap beberapa jenis hama dan penyakit, memerlukan masukan (pupuk dan pestisida) yang rendah, serta pemeliharaan mudah dan sederhana.

Varietas-varietas lokal umumnya selain berumur panjang, potensi

hasilnya memang rendah sekitar 2 ton GKG/ha. Namun padi gogo lokal Samparayang berasal dari Kabupaten Banggai merupakan padi yang dapat dipanen lebih cepat dibanding padi gogo lainnya. Dalam waktu sekitar 3 bulan, padi gogo tersebut sudah dapat dipanen, sehingga masyarakat setempat menyebutnya *paidongan* yang berarti tanam cepat.

Saat ini ada lima varietas unggul padi gogo hasil penelitian Badan Litbang Pertanian, yaitu Towuti, Situ Bagendit, Limboto, Situ Patenggang dan Inpago 12 Agritan. Varietas Inpago 12 Agritan dilepas pada tahun 2017 memiliki keunggulan produktivitas rata-rata mencapai 6,7 ton/ha, agak toleran terhadap kekeringan dan keracunan aluminium yang menjadi masalah di lahan kering masam. Varietas ini juga tahan terhadap penyakit blas atau yang sering disebut penyakit patah leher. Varietas ini memiliki tekstur nasi yang agak pulen.

Sedangkan varietas Situ Bagendit memiliki potensi gabah kering giling sebesar 6 ton/ha. Rata-rata hasil varietas ini di lahan kering sebesar 3 ton/ha dengan umur panen 115 hari. Varietas ini memiliki tekstur nasi pulen. Situ Bagendit juga memiliki ketahanan yang baik terhadap penyakit blas dan hawar daun bakteri.

Di Indonesia, potensi lahan kering untuk pengembangan padi gogo sangat besar. Dari luas 80 juta ha lahan kering yang sesuai untuk padi gogo mencapai 24,7 juta ha. Lahan tersebut terbagi menjadi lahan kering masam seluas 2,1 juta ha dan lahan kering iklim kering 3,7 juta ha. Ketersediaan benih menjadi salah satu kunci keberhasilan peningkatan produksi padi gogo nasional. **Yul**

Cabai Pelangi Bikin Halaman Lebih Cantik



Cabai Pelangi hasil inovasi Guru Besar IPB University, Prof. Dr. Muhammad Syukur, M.Si bisa menjadi alternatif bagi Ibu rumah tangga yang ingin mengisi halaman rumahnya. Kesibukan mengurus pekarangan akan lebih mengasikan. Bukan hanya hasilnya bisa untuk konsumsi sendiri, halaman rumah akan lebih indah dengan warna-warni cabai pelangi.

Seperti dikutip dari IPB.ac.id, cabai Pelangi adalah cabai yang dalam satu pohon memiliki warna berbeda sehingga tampak cantik warna-warni. Cabai ini bukan hanya cocok untuk menjadi tanaman hias, tapi juga bisa dikonsumsi.

Menurut Syukur, keunggulan lain cabai Pelangi yakni adalah, mudah ditanam, tidak memerlukan sinar matahari langsung, bisa ditanam pada suhu ruangan berbeda, sehingga aman dipindah-pindahkan ke tempat yang berbeda suhunya. Selain itu, ungkap Syukur, cabai pelangi bisa dipanen tiga hingga enam bulan.

Cabai hias ini ada tujuh varietas yaitu cabai Syakira, cabai Lembayung, cabai Jelita, cabai Namira, cabai Ayesa, cabai Ungara dan cabai Seroja. Masing-masing cabai memiliki ciri berbeda, tapi satu spesies yakni *Capsicum Annuum* yang umum dikonsumsi di Indonesia.

Cabai Syakira memiliki ciri-ciri berupa buah awal berwarna kuning kemudian hijau dan terakhir berwarna merah. Cabai Jelita, pohonnya lebih rimbun dan pendek dan memiliki degradasi warna yang mirip dengan cabai Syakira.

Sedangkan cabai Namira dapat dilihat dari buahnya yang menumpuk pada batang, berbeda dengan cabai

lainnya. Cabai Ayesa memiliki buah yang cenderung bulat dan berwarna ungu. Sedangkan cabai Lembayung dan cabai Ungara memiliki ciri bentuk cabai sedikit membulat dan berwarna ungu pekat (mengandung antosianin). Cabai Seroja memiliki 8 warna buah berbeda dan tingkat kepedasaannya cukup tinggi.

Cabai ini memiliki tingkat kepedasan di atas cabai sejenis pada umumnya dengan tingkat kepedasan sekitar 1000 ppm. Jauh berbeda dengan cabai pada umumnya yang hanya 200 ppm. Paling pedas adalah cabai Ungara, bisa sampai 1600 ppm.

Untuk perawatannya sendiri, Syukur mengungkapkan, cabai ini

tidak sesulit merawat tanaman cabai biasa. Tanaman ini mampu ditanam pada suhu ruangan dan tidak memerlukan sinar matahari langsung. "Ini berbeda dengan cabai lain yang kebanyakan harus ditanam di ruangan terbuka," katanya.

Cabai pelangi lebih mudah ditanam. Kita bisa menggunakan media tanam yang ditambahkan abemix dengan disiramkan 2 kali dalam seminggu. Buahnya bisa dipanen antara tiga hingga enam bulan kemudian. Saat ini, benih cabai pelangi sudah dipasarkan di seluruh Indonesia.

Bagian Genetika dan Pemuliaan Tanaman, Departemen Agronomi dan Hortikultura IPB sejak tahun 2003 telah menghasilkan banyak varietas cabai. Hingga kini telah dilepas dan didaftarkan di Kementerian Pertanian Republik Indonesia sebanyak 23 varietas cabai besar, cabai semikeriting, cabai keriting dan cabai hias serta tomat.

Berkat inovasinya di bidang hortikultura, Prof. Dr. Muhammad Syukur meraih berbagai penghargaan. Diantaranya dari Masyarakat Perbenihan dan Pembibitan Indonesia (MPPI) Award, Anugerah Kekayaan Intelektual Luar Biasa (AKIL), Inovasi Indonesia Paling Prospektif tahun 2016 oleh Business Innovation Center, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI. Prof. Syukur juga dinobatkan sebagai Dosen Berprestasi Peringkat I Nasional Tahun 2014.

Sumber IPB.ac.id/Yul

Komersialisasi E-PAPER SinarTani

TABLOID SinarTani

Tabloid sinartani.com

SINTA TV

E-paper Sinartani sudah berjalan selama 2 tahun dan memberikan informasi yang lebih banyak dibandingkan dengan Sinartani versi cetak. E-paper Sinartani terbit tiap minggu, 48 kali setahun, terdiri dari 20-24 halaman sekali terbit. Informasinya mencakup issue-issue yang lebih melebar, selain pertanian juga mencakup informasi umum dan humaniora.

Sampai saat ini e-Paper Sinartani masih didistribusikan secara gratis ke semua penyuluh. Kini, waktunya E-Paper yang sudah dikenal oleh penyuluh dan petani itu mulai dijual secara komersil dengan harga yang teramat murah, yaitu Rp 1.500/edisi atau Rp 72.000/tahun.

Mudah-mudahan upaya ini merupakan sinergi yang baik antara pembaca dengan penerbit Sinartani yang tidak henti-hentinya berupaya meningkatkan kualitas Sinartani agar lebih bermanfaat dan sekaligus memberi bahan bacaan yang baik bagi pembacanya.

Para pembaca yang ingin berlangganan dipersilahkan mengirimkan nama dan nomor HP-nya, melalui WhatsApp ke Sdr Wawan (081216304232) serta mentransfer biaya tahunan sebesar Rp 72.000 ke Rekening Sinartani: Bank Mandiri Cab. Ragunan No. 127.0096.016.413



BERLANGGANAN

E-paper Tabloid Sinartani

Hanya dengan
Rp. 72.000 / Tahun

HUBUNGI :
0813 1757 5066

Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut

KAMI MENJANGKAU LEBIH LUAS



Tengok Kementan, Prabowo : Pangan Hidup Mati Bangsa

Presiden Prabowo juga menegaskan komitmen pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan petani sebagai produsen utama pangan. Pemerintah RI telah menetapkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) untuk gabah kering panen sebesar Rp 6.500/kg.

"Saya siap keluaran Peraturan Pemerintah (PP). Saya tidak main-main. Ini adalah masalah kebangsaan. Pengusaha harus untung, tapi tidak boleh seenaknya. Semua pihak harus menang, mulai dari produsen, petani, pengusaha, hingga konsumen," tambahnya.

Dalam arahnya, Presiden Prabowo juga mengingatkan agar penggilingan padi di daerah tidak merugikan petani. Bahkan ia menegaskan siap mengambil langkah tegas jika ditemukan pelanggaran. "Penggilingan padi kalau main-main, saya akan tindak. Kita semua punya tanggung jawab. Saya ingin pengusaha mendapatkan keuntungan yang wajar, tetapi juga memiliki tanggung jawab terhadap kesejahteraan petani," tegasnya.

Presiden Prabowo optimistis

Indonesia akan menjadi negara yang sukses dalam mewujudkan swasembada pangan. Bahkan target yang diberikan selama empat tahun dapat dicapai lebih cepat dengan kerja sama semua pihak. "Indonesia akan jadi negara sukses, saya sangat yakin itu. Sekarang sudah terbukti bahwa target yang saya berikan empat tahun, tapi dalam waktu dekat kita akan swasembada," katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, berterimakasih atas dukungan Presiden Prabowo terhadap sektor pertanian. Saat ini berbagai permasalahan yang sebelumnya menghambat produktivitas petani kini telah diatasi berkat kebijakan Presiden yang responsif terhadap kebutuhan di lapangan.

"Inilah puncak kejayaan petani. Terima kasih kepada Bapak Presiden karena seluruh permintaan petani sudah Bapak penuhi, mulai dari pupuk, penyuluh pertanian lapangan (PPL), irigasi, dan berbagai fasilitas pendukung lainnya yang dulu menjadi kendala," ungkap Amran. **Yul**

Terkesan tidak ada pengawalan khusus, Presiden Prabowo Subianto berkunjung ke Kementerian Pertanian, di Jalan Harsono RM, Ragunan, Jakarta Selatan. Pada kesempatan itu, Prabowo melakukan *teleconference* bersama petani, penyuluh pertanian, kepala dinas provinsi, PERPADi serta jajaran terkait lainnya di Ruang SAS, Kantor Pusat Kementan, Jakarta (3/2).

"Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Mentan atas pengendalian terhadap situasi pertanian. Saya akui, ini sangat bagus. Tinggal semua unsur bekerja sama untuk memperkuat upaya ini," ujar Prabowo.

Presiden Prabowo juga menyam-

paikan apresiasi kepada semua pihak yang telah bekerja keras, sehingga Indonesia semakin dekat dengan target swasembada beras dan menuju swasembada pangan. Menurutnya, masalah pangan adalah isu krusial yang berkaitan langsung dengan kedaulatan dan kemerdekaan bangsa.

"Masalah pangan adalah hidup dan matinya bangsa Indonesia. Ini masalah kedaulatan, masalah kemerdekaan, dan survival kita sebagai bangsa. Kalau mau maju, pangan harus aman dulu. Saya minta semua pihak bekerja dengan hati yang tulus, cinta tanah air, dan patriotisme tinggi, setia pada tujuan swasembada pangan," tegasnya.

BPS - Kementan Sepakat Gunakan Satu Data

Kementerian Pertanian bersama Badan Pusat Statistik (BPS) sepakat hanya menggunakan satu data produksi pertanian dari Badan Pusat Statistik (BPS). Dengan demikian, tidak ada lagi polemik di publik. Kesepakatan tersebut ditandai dalam Penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) yang berlangsung di Gedung Kementerian Pertanian, Jakarta, Kamis (30/1).

Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman menegaskan dan meminta ke seluruh jajaran Kementerian Pertanian tidak boleh lagi mengeluarkan data. Jadi yang boleh mengeluarkan data pertanian adalah BPS. "Kita percayakan ke BPS. Alhamdulillah kita sudah sepakat bahwa kita satu pintu, yaitu datanya dari BPS, sehingga tidak menciptakan polemik di publik," katanya.

Mentan bersyukur karena sejauh ini data yang digunakan bersama sudah sesuai dengan hasil hitungan di lapangan dan juga angka tetap yang dirilis BPS. "Alhamdulillah kita sudah sepakat satu data sehingga tidak menciptakan polemik di publik. Kalau kita punya data sendiri bisa jadi polemik. Kami terima kasih kepada BPS yang telah bekerja menyediakan

data secara akurat," katanya.

Mentan menambahkan bahwa berdasarkan hitungan sementara produksi pada Januari, Februari, dan Maret mengalami peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Karena itu, ia ingin agar peningkatan ini jadi pemantik untuk Indonesia mewujudkan swasembada dan juga lumbung pangan dunia.

"Produksi Januari, Februari, dan Maret 2025 sesuai data BPS, juga sudah dilaporkan ke Presiden naik dibanding tahun lalu. Kenaikan Januari misalnya 50 persen, Februari 49 persen, dan Maret 51 persen," katanya.

Sementara itu, Plt Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan, dengan MoU akan memperkuat kolaborasi antara Kementerian Pertanian dengan BPS. Sebenarnya menurutnya, kolaborasi ini merupakan kelanjutan dari kerjasama sebelumnya.

"Dulu saat masih namanya Biro Pusat Statistik, kami dengan Kementerian Pertanian itu sudah mengawali kerjasama sejak tahun 1960," ujarnya. Karena itu, MoU kali ini tidak sekedar kelanjutan, tetapi justru momentum yang penting untuk



terus memperkuat kolaborasi antara Kementerian Pertanian dengan BPS.

Sesuai tupoksinya, BPS menghasilkan data statistik untuk bisa digunakan dan dimanfaatkan dalam rangka mendukung perumusan kebijakan pembangunan. Salah satunya adalah statistik pertanian. "Tentunya saya sangat mengapresiasi kepada Kementerian Pertanian yang sudah sangat baik berkolaborasinya," ujarnya.

Amalia mengatakan, Kementerian Pertanian yang mempercayakan BPS menjadi satu-satunya sumber data merupakan kepercayaan yang besar. Namun sekaligus akan menjadi cambuk pihaknya

terus menghasilkan data statistik, terutama pertanian.

Bahkan, kata Amalia, BPS akan terus meningkatkan kualitasnya, kemudian mengembangkan metodologinya dengan teknologi terbaru. "Kami akan terus memastikan cakupan dari sampelnya juga bisa betul-betul mewakili apa yang memang terpotret di lapangan," ujarnya.

"Kepercayaan yang luar biasa untuk BPS akan kami jadikan sebagai motivasi kami untuk terus menjadi selalu lebih baik dan tidak pernah puas dengan capaian yang kami lakukan pada hari ini," tambahnya.

Yul

10 Olahan Singkong Jadi Primadona Jualan Online



Singkong kini jadi primadona di pasar online. Dari keripik renyah hingga kue manis. Setidaknya 10 produk olahan singkong kini sedang tren dan laris manis. Penasaran?

Singkong memang sudah menjadi bahan makanan yang tidak lekang oleh waktu di Indonesia. Selain harganya yang terjangkau dan mudah ditemukan di pasar, singkong juga memiliki fleksibilitas tinggi dalam proses pengolahannya. Singkong bisa diubah menjadi camilan, lauk, bahkan makanan manis yang membuat ketagihan.

Bagi yang ingin mencoba terjun ke bisnis kuliner atau sekadar mencari ide jualan daring, olahan singkong bisa menjadi pilihan yang tepat. Bahan bakunya mudah ditemukan dan cara pembuatannya pun beragam, dapat disesuaikan dengan selera pasar.

Dari keripik singkong yang renyah, kue singkong yang legit, hingga tepung singkong yang multifungsi, semuanya memiliki potensi besar untuk laris manis di pasaran. Setidaknya 10 produk singkong yang banyak dicari di e-commerce.

Keripik Singkong

Keripik singkong selalu menjadi pilihan utama bagi penggemar camilan. Rasanya yang renyah dengan varian rasa yang melimpah, seperti original, balado, keju, barbeque, hingga rasa pedas, membuatnya tak pernah ketinggalan.

Ditambah dengan kemasan yang menarik dan desain modern, keripik singkong semakin diminati oleh banyak orang, terutama di pasar online yang mengutamakan produk dengan tampilan menarik.

Tape Singkong

Tape singkong memiliki penggemar setia yang menyukai rasa manis dan tekstur legit. Kini, tape singkong bisa dijual dalam kemasan modern yang lebih praktis, atau bahkan diolah menjadi produk baru seperti bolu tape atau es tape. Inovasi ini bisa menarik minat pasar yang mencari rasa tradisional dengan sentuhan kekinian.

Getuk

Makanan tradisional seperti getuk ternyata tetap digemari hingga kini. Dengan tampilan yang lebih menarik dan berbagai varian rasa, getuk bisa menjadi pilihan yang tepat untuk anak muda. Variasi seperti getuk gulung atau getuk warna-warni bisa jadi ide kreatif yang menggugah selera pasar.

Singkong Keju

Singkong goreng dengan taburan keju menjadi salah satu camilan yang sedang populer di media sosial. Dengan tambahan topping seperti cokelat, saus caramel, atau keju mozzarella, singkong keju bisa diubah menjadi camilan premium yang menggoda selera. Olahan singkong ini juga bisa menjadi pilihan bagi para foodies yang suka mencoba camilan unik dan kekinian.

Brownies Singkong

Brownies singkong, yang terbuat dari tepung singkong atau singkong kukus, menjadi pilihan tepat untuk pasar yang menyukai makanan gluten-free. Selain sehat, rasanya juga tidak kalah enak dibandingkan brownies biasa, menjadikannya pilihan ideal untuk mereka yang mencari camilan lezat namun lebih sehat.

Kroket Singkong

Kroket singkong menawarkan alternatif camilan gurih yang sehat dan mengenyangkan. Kroket ini bisa diisi dengan berbagai bahan, mulai dari ayam, daging sapi, hingga keju. Menariknya, kroket singkong bisa dijual dalam bentuk frozen, sehingga lebih tahan lama dan mudah disajikan.

Donat Singkong

Jika biasanya donat terbuat dari tepung terigu, donat singkong menawarkan alternatif yang lebih empuk dan lezat. Ditambah dengan topping kekinian seperti matcha, red velvet, atau nutella, donat singkong bisa jadi ide jualan yang unik dan menarik perhatian pembeli online.

Tiwul Instan

Tiwul, makanan khas Jawa yang terbuat dari singkong, kini hadir dalam bentuk instan yang praktis. Hanya perlu diseduh atau dikukus, tiwul instan menjadi alternatif makanan sehat yang cocok untuk mereka yang rindu masakan tradisional namun tetap ingin praktis dalam penyajiannya.

Singkong Goreng Bumbu Rujak

Singkong goreng bumbu rujak adalah camilan kekinian yang menggabungkan rasa gurih dari singkong goreng dengan saus rujak manis pedas. Camilan ini tidak hanya menggugah selera, tetapi

juga cocok untuk mereka yang suka mencoba rasa baru. Dengan popularitasnya yang meningkat, singkong goreng bumbu rujak menjadi pilihan yang menjanjikan di pasar online.

Kue Lumpur Singkong

Kue lumpur yang biasanya terbuat dari kentang, kini bisa diubah dengan singkong sebagai bahan utamanya. Rasanya yang tetap lembut, manis, dan legit menjadikannya pilihan sempurna untuk segala acara, mulai dari arisan hingga hantaran. Kue lumpur singkong dapat menjadi pilihan unik yang pastinya laris di pasaran. **Gsh**

Trik Jualan Olahan Singkong

Jika tahu trik-triknya, maka jualan produk olahan singkong bisa menjadi bisnis yang menggiurkan. Langkah pertama yang penting adalah memilih bahan baku yang berkualitas. Singkong yang segar, tanpa rasa pahit, akan memberikan hasil olahan yang lebih enak dan memuaskan pelanggan. Selain itu, pastikan kamu selalu menggunakan singkong yang bebas dari gangguan kualitas agar rasa dan tekstur produk tetap optimal.

Kemasan juga memainkan peran yang sangat penting dalam menarik perhatian pembeli. Kemasan yang menarik, modern, dan praktis bisa jadi faktor pembeda yang membuat produkmu lebih menonjol di pasar. Jangan ragu untuk bereksperimen dengan desain kemasan yang kekinian, karena itu bisa memberi kesan pertama yang baik bagi pelanggan.

Selain itu, manfaatkan kekuatan media sosial untuk mempromosikan produkmu. Platform seperti Instagram, TikTok,



atau marketplace sangat efektif untuk menjangkau audiens yang lebih luas. Kamu bisa mengunggah foto-foto menarik atau video kreatif yang menunjukkan cara membuat atau menikmati produk olahan singkong.

Terakhir, jangan takut untuk berinovasi. Cobalah berbagai varian rasa baru yang bisa membuat pelanggan penasaran. Misalnya, olahan singkong dengan bumbu baru atau kombinasi rasa yang unik. Dengan cara ini, pelanggan akan terus kembali dan produkmu tetap menarik di pasar yang kompetitif.

Gsh